

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2023



LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2023

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Segala bentuk penggandaan, penerjemahan, atau memproduksi baik melalui media cetak maupun elektronik harus seizin penerbit, kecuali untuk kutipan ilmiah.



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc (Plt. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian)

Penanggung Jawab

Dr. Ir. Ketut Kariyasa, M.Si (Kepala Biro Perencanaan)

Ketua

Zainul Azmi, SP, M.Ec. M.SE (Ketua Kelompok Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian)

Sekretaris

Mirza Sativa, SP, M.Si

Anggota

Ruri Sitaresmi, SP Mugi Hidayat, S.ST Akbar Choer, S.Pt Handi Wiranata, S.Kom, MM Nur Rokhmah Fitriani, SP Adi Nurahmat, SS, MM Murtasih, SE Ermawati, S.Kom



SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN



"Pertanian Cemerlang, Indonesia Gemilang, menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia..."

Dinamika global yang kita saksikan terjadi belakangan ini--diantaranya fenomena perubahan iklim ekstrem kekeringan (*El Nino*), ketegangan geopolitik internasional, perang dagang, kenaikan harga-harga pangan dan energi--telah memengaruhi berbagai aspek perekonomian Indonesia, termasuk sektor pertanian. Namun demikian, sektor pertanian nasional masih mampu menunjukkan resiliensinya yang ditunjukkan dengan pertumbuhan

PDB Pertanian di tahun 2023 sebesar 1,30 persen dan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan total PDB yaitu 11,53 persen. Di samping itu, sektor pertanian nasional juga masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hampir mencapai 30 persen.

Meskipun sektor pertanian telah teruji memiliki ketahanan yang sangat baik di tengah berbagai tantangan global yang ada, Kementerian Pertanian terus bekerja keras untuk memperkuat sektor ini, khususnya di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca *Covid* dan dampak perubahan iklim. Dari sisi kebijakan misalnya, Kementerian Pertanian mengalokasikan sumber daya dan dukungan finansial untuk fokus pada penyediaan akses terhadap sumber-sumber air yang merupakan faktor kunci peningkatan produksi, disamping pula penyediaan alat dan mesin pertanian, optimalisasi lahan-lahan sub-optimal, serta penguatan sistem penyuluhan. Dalam hal dukungan anggaran, pada tahun 2023 ini dilakukan realokasi anggaran Kementerian Pertanian mendukung peningkatan produksi padi dan jagung, mengingat kedua komoditas ini sangat memengaruhi ketahanan pangan nasional.

Upaya peningkatan produksi komoditas pertanian strategis juga diiringi dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, serta peningkatan pelayanan dalam hal pengurusan ekspor. Usaha tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan, yang tercermin dengan nilai ekspor segar maupun olahan komoditas pertanian tercatat meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dalam jangka menengah dan panjang, potensi besar sektor pertanian Indonesia di pasar internasional tersebut perlu didukung oleh sektor lainnya, untuk selanjutnya membuka peluang pasar ekspor di lokasi-lokasi potensial non-tradisional.

Kementerian Pertanian juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, yang merupakan faktor terpenting dalam sistem produksi pertanian. Kami percaya bahwa meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja pertanian akan membawa sektor ini ke arah yang lebih baik. Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Kementerian Pertanian terus mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha muda pertanian dan petani milenial, disamping pula peningkatan kualitas petani existing melalui berbagai pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh. Khusus di tahun 2023 ini, kami menginisiasi pendampingan petani oleh Babinsa TNI AD, mengingat jumlah penyuluh Indonesia yang masih sangat kurang dibandingkan dengan total wilayah yang harus dilayani. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dan berbagai elemen bangsa yang ada, kami percaya kita dapat semakin meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional.



Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang setinggitingginya kepada seluruh aparatur Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dan lintas sektoral, yang selama ini telah bekerja keras membangun sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat diteruskan dan ditingkatkan agar kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan sebagai catatan pembelajaran tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang seharusnya dilakukan, untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang berkualitas menuju Indonesia lumbung pangan dunia.

Jakarta, April 2024 Menteri Pertanian,

Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP



KATA PENGANTAR



Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian, upaya penyediaan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi fokus utama Kementerian Pertanian, sehingga mampu mewujudkan swasembada pangan dan, pada akhirnya, ketahanan pangan. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang dengan memperkuat kerjasama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pertanian untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan strategis yang menjadi terobosan telah diakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sebagai wujud inovasi dalam mengatasi

berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2023 ini memaparkan berbagai upaya dan pencapaian Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2023 dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan. Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, kami menyadari bahwa masih diperlukan perbaikan dan terobosan yang mendorong percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dalam tahun 2023, beberapa program terobosan yang telah dilakukan antara lain optimalisasi lahan yang belum tergarap seperti lahan rawa, peningkatan pelibatan penyuluh pertanian, penyelesaian permasalahan pupuk, dan maksimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian, termasuk alat dan mesin pertanian yang tepat guna.

Meskipun Kementerian Pertanian menghadapi berbagai permasalahan dan kendala baik secara internal maupun lingkungan eksternal, kami bangga melihat capaian Kementerian Pertanian yang secara umum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, dan berharap kerjasama yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan. Kami menyadari bahwa laporan ini belum mencakup seluruh aspek kegiatan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, namun berbagai aspek penting dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaporkan secara transparan dalam Buku Laporan Tahunan ini.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang tertarik dan terlibat dalam pembangunan pertanian Indonesia.

Jakarta, April 2024 Plt. Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP. 196908161995031001





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2023 telah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian selama tahun tersebut, dengan tujuan mencapai visi dan misi pembangunan pertanian. Laporan ini juga mencakup pencapaian pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2023, yang menjadi bagian dari akuntabilitas Kementerian.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pertanian memberikan dampak positif bagi masyarakat pertanian, meskipun masih terdapat beberapa capaian atau target pembangunan pertanian yang memerlukan upaya perbaikan dan kerja keras pada tahun mendatang. Beberapa indikator makro pembangunan pertanian yang menunjukkan hasil positif antara lain adalah pertumbuhan sebesar 1,3 persen sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh subsektor peternakan yang mencatat pertumbuhan sebesar 3,71 persen, didukung oleh peningkatan produksi unggas dalam negeri dan permintaan luar negeri terhadap produk ternak unggas. Sementara itu, subsektor tanaman perkebunan juga tumbuh sebesar 1,73 persen, didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas perkebunan seperti sagu, nilam, dan cengkeh

Selain itu, terdapat peningkatan pada rata-rata nilai NTP tahun 2023 sebesar 112,7 atau meningkat sebesar 4,78 persen; serta rata-rata nilai NTUP sebesar 113,2 atau meningkat sebesar 5,34 persen. Produksi beberapa komoditas pertanian seperti kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan ayam), susu, dan telur juga mengalami peningkatan, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Capaian positif ini merupakan hasil dari upaya Kementerian Pertanian dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2023, sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program dan kegiatan tersebut termasuk penguatan komoditas tanaman pangan yang terus dilakukan meskipun dihadapkan pada kondisi sulit akibat kekeringan atau El Nino. Contohnya, pengembangan padi melalui pengembangan berbagai jenis padi, budidaya biopresisi, dan optimalisasi peningkatan indeks pertanaman (IP). Selain itu, pengembangan jagung juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, dengan fokus pada pengembangan wilayah khusus jagung, jagung pangan, dan Food Estate jagung.

Penguatan komoditas hortikultura juga dilakukan dengan pengembangan kawasan hortikultura strategis, didukung oleh pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan. Selain itu, program bimbingan teknis, pengembangan *Food Estate*, pengembangan kawasan bawang merah biji, dan implementasi Sistem Informasi (SI) sebagai early warning system (EWS) untuk komoditas cabai dan bawang merah juga telah dilakukan.

Penguatan komoditas perkebunan dilakukan melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi untuk peningkatan produksi dalam jangka panjang, serta pengembangan kawasan melalui intensifikasi untuk program jangka pendek. Di sisi lain, penguatan komoditas peternakan dilakukan dengan optimalisasi reproduksi pada 3,17 juta akseptor, sertifikasi benih semen beku, sertifikasi bibit, bantuan ternak, peningkatan skala usaha peternakan melalui korporasi petani peternakan, dan penanganan serta pencegahan penyakit hewan menular strategis.

Untuk mendukung program dan kegiatan strategis pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian juga terus melakukan perbaikan melalui Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di seluruh unit kerja, baik di Pusat maupun Daerah. Keberhasilan Kementerian Pertanian juga tercermin dari kemampuan sumber daya manusia pertanian yang handal, yang dipersiapkan melalui penguatan pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan.

Kesiapan baik kapasitas maupun kapabilitas sumber daya manusia yang memadai dapat mendukung implementasi program-program terobosan Kementerian Pertanian untuk pembangunan pertanian. Di tahun 2023, beberapa program terobosan telah dilaksanakan, seperti pengembangan *Food Estate*, *major project* korporasi petani dan nelayan, serta gerakan nasional (Gernas) *El Nino*. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian didukung dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti bantuan alat dan mesin pra tanam pertanian, irigasi, pembangunan embung pertanian, serta sarana pascapanen dan pengolahan.

Selain itu, fasilitas juga disediakan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, asuransi usahatani, dan dukungan dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik, serta standarisasi instrumen pertanian dan sertifikasi karantina. Kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya dinilai dari capaian produksi, namun juga dari dukungan terhadap program strategis pemerintah lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan pengarusutamaan gender.

Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam implementasi program-program ini juga mendapat pengakuan melalui berbagai penghargaan, termasuk Opini WTP BPK selama 6 tahun berturutturut, praktek terbaik inovasi pelayanan publik, BKN award 2023 untuk Implementasi Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar, serta penghargaan lainnya yang menunjukkan komitmen dan kualitas kerja Kementerian Pertanian dalam mengemban tugasnya untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.







Daftar Isi

		Halaman
Sambı	utan Menteri Pertanian	i
Kata P	Pengantar	ii
Ringka	asan Eksekutif	iii
Daftar	isi	vi
Daftar	Gambar	viii
Daftar	Tabel	xiii
BAB I	ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN	1
1.1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	2
1.2.	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	6
1.3.	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	9
1.4.	Struktur Organisasi	20
1.5.	Postur Anggaran	21
	1.5.1. APBN Kementerian Pertanian	21
	1.5.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)	22
BAB II	POTRET MAKRO PERTANIAN	23
2.1.	Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian	24
2.2.	Ekspor Impor Produk Pertanian Indonesia	25
	2.2.1. Perkembangan Ekspor Produk Pertanian	26
	2.2.2. Perkembangan Impor Produk Pertanian	27
2.3.	Perkembangan Nilai Tukar Petani	30
2.4.	Perkembangan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian	31
2.5.	Tenaga Kerja Sektor Pertanian	31
2.6.	Produksi Komoditas Strategis Dalam Negeri	33
	2.6.1. Tanaman Pangan	33
	2.6.2. Hortikultura	36
	2.6.3. Peternakan	39
	2.6.4. Perkebunan	43
BAB II	II KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN	45
3.1.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	46
	3.1.1. Manajemen SDM Kementerian Pertanian	46
	3.1.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 202	3 48
3.2.	Pengembangan SDM Pertanian	53
	3.2.1. Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2023	53
	3.2.2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	54
1.6	3.2.3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanjan Tahun 2023	58

		Halaman
	3.2.4. Pemantapan Sistem Pendidikan Pertanian Tahun 2023	64
3.3.	Implementasi Program Terobosan	65
	3.3.1. Pengembangan Food Estate	65
	3.3.2. Korporasi Petani	79
	3.3.3. Gernas El Nino	84
3.4.	Sarana dan Prasarana Pertanian	88
	3.4.1. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	88
	3.4.2. Pengembangan Embung Pertanian	91
	3.4.3. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	92
	3.4.4. Unit Pengelolaan Pupuk Organik	93
	3.4.5. Pembiayaan Sektor Pertanian	93
3.5.	Standardisasi Instrumen Pertanian	98
3.6.	Sertifikasi Karantina	102
BAB I	V CAPAIAN KINERJA LAINNYA	103
4.1.	Kinerja DAK Pertanian dan Subsidi Pupuk	104
	4.1.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian	104
	4.1.2. Pupuk Bersubsidi	109
4.2.	Kemiskinan Ekstrem, dan Stunting (Biofortifikasi)	111
	4.2.1. Kemiskinan Ekstrem	111
	4.2.2. Penurunan Stunting dengan Padi Kaya Gizi Biofortifikasi	116
4.3.	Penghargaan dari K/L Lainnya	120
4.4.	Pengendalian Inflasi Sektor Pertanian	126
4.5.	Pengarusutamaan Gender	128
4.6.	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Ri	129
PENU	TUP	131





Daftar Gambar

	Hala	aman
Gambar 1.	Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024	2
Gambar 2.	Sembilan Poin Nawacita Misi Presiden	3
Gambar 3.	Visi RPJMN 2020-2024 yang dipetakan ke dalam Tujuh Agenda	
	Pembangunan Nasional	3
Gambar 4.	Redesign Transformasi Ekonomi Indonesia	4
Gambar 5.	Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	6
Gambar 6.	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023	7
Gambar 7.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	7
Gambar 8.	Strategi Pembangunan Tahun 2023	8
Gambar 9.	Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023	8
Gambar 10.	Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian	10
Gambar 11.	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024	10
Gambar 12.	Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian	11
Gambar 13.	Lima Program Kementerian Pertanian mendukung Prioritas Nasional 1	18
Gambar 14.	Struktur Organisasi Kementerian Pertanian	21
Gambar 15.	Sumber Pendanaan APBN Kementerian Pertanian TA 2023	21
Gambar 16.	Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik TA 2023 di Kementerian Pertanian	22
Gambar 17.	Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan	
	Tahun 2019-2024	24
Gambar 18.	Neraca Perdagangan Produk Pertanian Segar dan Olahan	
	Tahun 2019-2023 (US\$ Miliar)	25
Gambar 19.	Perkembangan Nilai Ekspor Produk Pertanian Segar dan Olahan	
	Tahun 2019-2023 (USD Ribu Miliar)	26
Gambar 20.	Perkembangan Nilai Impor Produk Pertanian Segar dan Olahan	
	Tahun 2019-2023 (USD Ribu Miliar)	27
Gambar 21.	Perkembangan Nilai Tukar Petani 2022-2023 per bulan	30
Gambar 22.	Perkembangan Rata-Rata NTP Sektor Pertanian per Sub Sektor	
	Tahun 2019-2023	30
Gambar 23.	Perkembangan NTUP per Subsektor Tahun 2019-2023	31
Gambar 24.	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2020-2023	31
Gambar 25.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi	
	Tahun 2019-2023	33
Gambar 26.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung	
	Tahun 2019-2023	34

Halaman

Gambar 27.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Lahan Kedelai	
	Tahun 2019-2023	35
Gambar 28.	Kegiatan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	35
Gambar 29.	Produksi Cabai Tahun 2019-2023	36
Gambar 30.	Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2019-2023	37
Gambar 31.	Produksi Bawang Putih (Ton) Tahun 2019-2023	38
Gambar 32.	Strategi Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2023	42
Gambar 33.	Tujuan Jangka Menengah 2020-2024 Direktorat Jenderal Perkebunan	43
Gambar 34.	Target dan Realisasi Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2023	44
Gambar 35.	Sebaran Pegawai berdasarkan Golongan pada Unit Kerja Eselon I	
	Tahun 2023	46
Gambar 36.	Sebaran Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	46
Gambar 37.	Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2022-2023	47
Gambar 38.	Sebaran Jumlah Pegawai Laki-Laki dan Perempuan pada Unit Kerja	
	Eselon I Tahun 2022-2023	47
Gambar 39.	Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024	48
Gambar 40.	Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023	51
Gambar 41.	Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)	
	Tahun 2023	54
Gambar 42.	Kegiatan Program Rural Empowerment of Agriculture Scaling up Initiative	
	(READSI) Tahun 2023	58
Gambar 43.	Metode Penyuluhan Pertanian melalui Kegiatan Sekolah Lapang (SL)	
	Tematik Genta Organik Tahun 2023	59
Gambar 44.	Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2023	60
Gambar 45.	Simluhtan yang telah Terintegrasi melalui Webservice Ditjen Dukcapil	60
Gambar 46.	Kegiatan Pekan Nasional (PENAS) di Lapangan Udara (LANUD)	
	Sutan Sjahrir Kota Padang Sumatera Barat, Tanggal 10-15 Juni 2023	61
Gambar 47.	Kegiatan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian di Lokasi	
	Gernas El Nino Tahun 2023	61
Gambar 48.	Kegiatan Pembinaan Penyuluh, Petani, dan Babinsa oleh Presiden dan	
	Menteri Pertanian Tahun 2023	62
Gambar 49.	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Tahun 2023	62
Gambar 50.	Kegiatan Lapangan Strategic Irrigation Modernization and Urgent	
	Rehabilitation Project (SIMURP) Tahun 2023	63

	Hala	ıman
Gambar 51.	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan Food Estate	
	Tahun 2020-2022	66
Gambar 52.	Pembagian Tugas dan Peran Eselon I dalam Pengembangan Food Estate	
	Kalimantan Tengah	66
Gambar 53.	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Lokasi Food Estate	
	Kalimantan Tengah	68
Gambar 54.	Pengembangan Komoditas Hortikultura di Lokasi Food Estate	
	Kalimantan Tengah	68
Gambar 55.	Pengembangan Komoditas Perkebunan di Lokasi Food Estate	
	Kalimantan Tengah	69
Gambar 56.	Pengembangan Komoditas Peternakan di Lokasi Food Estate	
	Kalimantan Tengah	69
Gambar 57.	Masterplan Food Estate Sumatera Utara	72
Gambar 58.	Capaian Produksi dan Produktifitas Food Estate Sumatera Utara	73
Gambar 59.	Simpul Centre of Excellence menjadi Trigger Pengembangan KSPP	74
Gambar 60.	Lokasi Food Estate Sumatera Utara Blok A	75
Gambar 61.	Kerjasama Petani dengan PT Parna Raya, 50 Ha untuk Jagung	
	di Pakpak Bharat	75
Gambar 62.	Lokasi Pengembangan <i>Food Estate</i> Kab. Sumba Tengah	76
Gambar 63.	Kegiatan Pengembangan Food Estate di Kab. Sumba Tengah	77
Gambar 64.	Dasar Hukum Major Project Penguatan Jaminan serta 350 Korporasi	
	Petani dan Nelayan	79
Gambar 65.	Intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian	82
Gambar 66.	Dukungan Penyuluhan Pertanian	82
Gambar 67.	Lima Percontohan Korporasi Petani	83
Gambar 68.	Kendala Pengembangan Korporasi Petani	84
Gambar 69.	Peta Sebaran Kegiatan El Nino Sektor Pertanian	85
Gambar 70.	Realisasi Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino	
	TA 2023	87
Gambar 71.	Kegiatan Irigasi Pertanian mendukung Penanganan dampak <i>El Nino</i>	88
Gambar 72.	Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air	
	(Gernas <i>El Nino</i>) TA 2023	88
Gambar 73.	Realisasi Fisik Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Alat dan Mesin	
	Pertanian Tahun Anggaran 2023	89

	Hala	aman
Gambar 74.	Peta Penyaluran Bantuan Traktor Roda-4 Kementerian Pertanian	
	TA 2023	90
Gambar 75.	Pemanfaatan Traktor Roda-2	90
Gambar 76.	Pemanfaatan Pompa Air	91
Gambar 77.	Pembangunan Embung Sektor Pertanian TA 2023	92
Gambar 78.	Realisasi Fisik Kegiatan Infrastruktur Irigasi Pertanian TA 2023	93
Gambar 79.	Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) TA 2023	93
Gambar 80.	Realisasi Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) (ha) Tahun 2019-2023	95
Gambar 81.	Realisasi Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS) (ekor)	
	Tahun 2019-2023	96
Gambar 82.	Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)	96
Gambar 83.	Trend Realisasi Penyaluran KUR Sektor Pertanian berdasarkan	
	Kepulauan	97
Gambar 84.	Tahapan Penyusunan RSNI	99
Gambar 85.	Pendampingan Lembaga Penerap Standar Pertanian	100
Gambar 86.	Lokasi dan Komoditas ICARE di 9 (sembilan) Provinsi	101
Gambar 87.	Tahapan Pembangunan Gudang Benih UPTD Perbenihan	
	Tanaman Pangan	106
Gambar 88.	Tahapan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan	107
Gambar 89.	Kegiatan Rumah Benih, Pelayanan Keswan dan Pelatihan Tematik	
	Pupuk Organik di BPP	108
Gambar 90.	Perbandingan Desil per Provinsi Tahun 2023	113
	Tematik Genta Organik Tahun 2023	59
Gambar 91.	Target Penurunan Prevalensi Stunting 2020-2024	116
Gambar 92.	Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi	
	Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada Inovasi BIOTRON dari	
	BBPP Binuang	120
Gambar 93.	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023	
	Gernas El Nino Tahun 2023	121
Gambar 94.	Penghargaan BKN Award untuk Implementasi Penerapan Manajemen	
	Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar dan Implementasi NSPK	
	Manajemen ASN Terbaik	122
Gambar 95.	Penyerahan Penghargaan Top 7 Best Exhibition ASN Culture Fest 2022	
	dari Kemenpan-RB	122



	Hala	ıman
Gambar 96.	Kementan dianugerahi Top Digital Implementation 2023 level star	
	& Top Leader on Digital Implementation 2023	123
Gambar 97.	Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan	
	SPLP Tingkat K/L Tahun 2023	124
Gambar 98.	Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman	125
Gambar 99.	Kementerian Pertanian mendapat Penghargaan "Anugerah Keterbukaan	
	Informasi Publik 2023 Kategori Kementerian Terbaik	125
Gambar 100.	Perkembangan Inflasi Periode Tahun 2017 hingga Januari 2024	127
Gambar 101.	Penyerahan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023	128



Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.	Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2019-2023	39
Tabel 2.	Rincian Hasil Nilai RB Kementan Tahun 2023	50
Tabel 3.	Kelembagaan Penyuluhan Tahun 2023	54
Tabel 4.	Ketenagaan Pertanian Tahun 2023	54
Tabel 5.	Capaian Program PHLN-READSI Tahun 2023	55
Tabel 6.	Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Kegiatan Ekstensifikasi	
	TA 2021-2023	67
Tabel 7.	Dampak Ekonomi Pelaksanaan Food Estate TA 2020-2021	67
Tabel 8.	Dampak Ekonomi Pelaksanaan Food Estate TA 2022	67
Tabel 9.	Daftar Bantuan Food Estate Sumba Tengah	76
Tabel 10.	Target, Luas Tanam dan Produksi di Lokasi Food Estate Kab. Belu	77
Tabel 11.	Kendala dan Permasalahan Pengembangan Food Estate di Kab. Belu	78
Tabel 12.	Kelembagaan Korporasi Petani Kementan 2020-2024	82
Tabel 13.	Korporasi Petani Kementan yang telah dibentuk tahun 2020-2023	83
Tabel 14.	Realisasi Kegiatan Gernas El Nino di 10 Provinsi Tahun 2023	86
Tabel 15.	Alokasi Kegiatan Irigasi Pertanian Penanganan Dampak <i>El Nino</i> TA 2023	87
Tabel 16.	Target dan Realisasi KUR Pertanian Per Sub Sektor TA 2023	98
Tabel 17.	Frekuensi Kegiatan Operasional Karantina Hewan Tahun 2022-2023	102
Tabel 18.	DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Pertanian	104
Tabel 19.	Capaian Kinerja DAK Non Fisik Bidang Ketahanan Pangan TA 2023	108
Tabel 20.	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2023	110
Tabel 21.	Alokasi dan Realisasi Kegiatan Kementerian Pertanian mendukung	
	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	112
Tabel 22.	Sasaran dan Realisasi Padi Biofortifikasi Tahun 2023	117
Tahel 23	Data Rekomendasi RPK yang telah Ditindaklanjuti	120









1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi telah membuat telah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut memuat Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025.

Visi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

- Kedaulatan berada di tangan rakyat.
- Negara memajukan kebudayaan nasional.
- TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Berdaulat

Mandiri

Berkepribadian Berlandaskan gotong royong

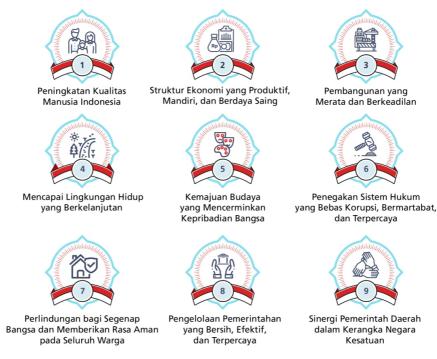
Gambar 1. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024



Dalam mencapai Visi RPJMN 2020–2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam sembilan poin Nawacita yaitu:

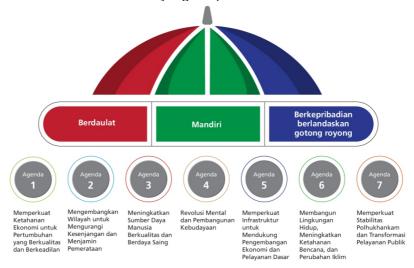
Laporan Tahunan Kementerian Pertanian 2023

Sembilan Poin Nawacita Misi Presiden



Gambar 2. Sembilan Poin Nawacita Misi Presiden

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 yang meliputi:



Gambar 3. Visi RPJMN 2020-2024 yang dipetakan ke dalam tujuh agenda pembangunan nasional





Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi *COVID-19*. Pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca-*COVID-19* diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengahpanjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, *Artificial Intelegence (AI)* dan *big data*, disrupsi rantai pasok *global*, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.



Gambar 4. Redesign Transformasi Ekonomi Indonesia





1.2. Rencana Kerja Pemerintah 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 diimplementasikan setiap tahunnya yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, dan untuk tahun 2023 yaitu RKP Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. RKP Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan RPJMN Tahun 2020–2024.

Tema RKP Tahun 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Gambar 5. Kerangka Prioritas Nasional RKP tahun 2023

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan.



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI **EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**

PRODUKTIVITAS

- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- Mendorong pemulihan dunia usaha
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara • Infrastruktur digital dan konektivitas



INKLUSIF

- Percepatan penghapusan kemiskinan
- Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain; air bersih dan sanitasi





- 1. SDM Berdaya Saing
- 2. Produktivitas Sektor Ekonomi
- 3. Ekonomi Hijau
- 4. Transformasi Digital
- 5. Integrasi Perekonomian Domestik
- 6. Pemindahan IKN

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi BERKELANJUTAN (respons terhadap perubahan iklim)

Gambar 6. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:

Tema RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi

yang Inklusif dan Berkelanjutan Arah Kebijakan Peningkatan kualitas Penanggulangan pengangguran Mendorong Percepatan SDM: kesehatan dan disertai dengan peningkatan pemulihan dunia penghapusan pendidikan kemiskinan ekstrem decent job usaha Revitalisasi industri Pembangunan rendah Percepatan Pembangunan Ibu karbon dan transisi Kota Nusantara dan penguatan riset pembangunan terapan energi (respons terhadap infrastruktur dasar perubahan iklim)

Gambar 7. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023





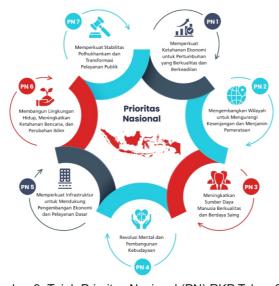


Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan:



Gambar 8. Strategi Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga ke`sinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.



Gambar 9. Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023



1.3. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020- 2024

RPJMN 2020-2024 Salah satu yang diatur dalam RPJMN 2020-2024 yaitu terkait sektor pertanian. Untuk itu, dalam mengimplementasiakn RPJMN, Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian tersebut memuat visi misi Kementerian Pertanian serta tujuan, arah kebijakan, strategi dan terobosan yang dilakukan dalam rangka pemwujudkan target pembengunan nasional sektor pertanian.

Sejalan dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Pertanian menerjemahkan ke dalam Visi dan Misi Kementerian Pertanian melalui Rencana Strategi Kementerian Pertanian 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 dan mengalami revisi kedua sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

— Visi Kementerian Pertanian

Dalam menerapkan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi dan tujuan Kementerian Pertanian yaitu:



Misi Tujuan Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Mewujudkan Pangan; Ketahanan Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Meningkatkan Nilai Saing Pertanian; Tambah dan Daya Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Saing Pertanian, serta Inovasi Pertanian: Pengelolaan Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Kementerian Pertanian Sumber Daya Manusia Pertanian Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Bersih, Efektif Kementerian Pertanian dan Terpercaya.

Gambar 10. Misi dan tujuan Kementerian Pertanian

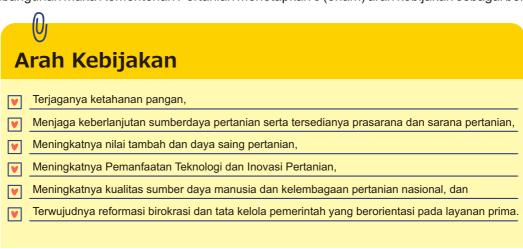
Visi dan Misi serta tujuan Kementerian Pertanian diterjemahkan dengan menetapkan sasaran strategis pembangunan pertanian yang disusun berdasarkan beberapa hal yaitu: target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis.





Gambar 11. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut:



Gambar 12. Arah Kebijakan Pembangunan pertanian

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian. Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian. Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global, maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, *on farm*, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Berdasarkan fokus kebijakan Kementerian Pertanian tersebut, apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:



Strategi ketahanan pangan nasional

- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian,
 - Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik.



- Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Nasional, dan
 - Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (Good Agricultural Practice, Good Handling Practice dan Good Manufacturing Practice)
 - Mengurangi kehilangan hasil panen (food loss) dan limbah pangan (food waste)
 - Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim
 - Mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani
 - Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian
 - Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa
 - Meningkatkan populasi hewan ternak
 - Mengembangkan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman ternak)
 - Menerapkan pertanian presisi/ digitalisasi pertanian
- Peningkatan Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan.
 - Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan
 - Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming)
 - Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi
 - Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan



Strategi Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian serta tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian

- Meningkatkan Ketersediaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan serta Peningkatan Ketersediaan Air melalui:
 - Audit lahan pertanian
 - Meningkatkan luas areal pertanian dengan menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan



- Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar
- Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal
- Optimalisasi sumberdaya air yang *existing* dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan
- Peningkatan fungsi prasarana irigasi
- Penerapan teknologi hemat air
- Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam parit (*long storage*)
- Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan
- Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya melalui:
 - Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat (KUR)
 - Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis
 - Fasilitasi program asuransi pertanian
- Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida melalui:
 - Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
 - Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih
 - Penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan
 - Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi
 - Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan
 - Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian melalui:
 - Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan
 - Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi willayah dan jenis tanaman
 - Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan
 - Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri

- Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan
- Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah
- Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan
- Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan
- Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan.



Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

- Peningkatan nilai tambah
 - Pengembangan dan penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar
 - Penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen dan pemasaran di tingkat petani/kelompok tani
 - Hilirisasi inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri
 - Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian
 - Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani
 - Pengembangan cold storage dan silo untuk komoditas strategis
 - Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian
 - Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan
- Peningkatan daya saing pertanian
 - Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan
 - Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan ekspor dan investasi
 - Penguatan sistem perkarantinaan guna mendukung percepatan ekspor
 - Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan
 - Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi Free Trade Area (FTA)
 - Penyelesaian sengketa dagang



- Penguatan Market Intelegence di luar negeri
- Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui *OSS (One Single Submission)* atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.
- Mendorong generasi millenial untuk menjadi eksportir
- Penerapan *inline inspection* yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor.
- Percepatan Program *I-Mace* (*Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export*) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor.
- Penerapan elektronik sertifikat (E-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin
- Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor
- Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan
- Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses
- Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor

Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Pertanian

- ▼ Mendorong penciptaan teknologi inovatif pertanian secara terpadu
 - Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai pihak (lembaga penelitian pertanian dan pengguna) secara berkelanjutan
 - Sinkronisasi dan sinergitas program penelitian, pengkajian, dan diseminasi dengan program penyuluhan pertanian
 - Meningkatkan kualitas benih/bibit unggul hasil penelitian dan pengembangan
 - Peningkatan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan dalam penetapan skala prioritas kawasan pertanian
 - Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian



- ▼ Mendorong pengembangan teknologi inovatif
 - Pengembangan teknologi inovatif yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
 - Penguatan sinergi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian
 - Pengembangan pertanian presisi dan digitalisasi pertanian
 - Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan
 - Menumbuhkembangkan industri serta kelembagaan pengujian alsintan terakreditasi
- Mengembangkan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi
 - Pengkajian teknologi inovatif pertanian spesifik lokasi
 - Pengembangan teknologi hemat air/pertanian presisi
 - Pengembangan teknologi dan penerapan alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman
 - Penguatan/modernisasi unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen
 - Pengembangan kajian teknologi inovatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat antisipatif dan responsif bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah
- Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif
 - Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna
 - Penguatan pengelolaan alih teknologi pertanian melalui akselerasi komersialisasi hasil litbang
 - Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri
 - Peningkatan efektifitas pendampingan dan pengawalan teknologi inovatif mendukung program strategis kementan.



Strategi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

- ▼ Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
 - Menstandarkan semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO 9001: 2015
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan



- Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar
- Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta
- Memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha
- Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian
- Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital.
- Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
 - Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta
- Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawalan pembangunan pertanian
 - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani
 - Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian
- Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning
- Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh
 - Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian
- Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
 - Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional
 - Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional
 - Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara
- ▼ Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
 - Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan avokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing
- Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja
 - Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian





5 PROGRAM KEMENTAN

- Penguatan kelembagaan petani
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha
 - Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani
 - Peningkatan skala ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUB) petani muda
- ▼ Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Kementerian Pertanian menyusun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dan dituangkan dalam program kerja tahunan melalui rencana kerja kementerian pertanian. Rencana kerja Kementerian Pertanain juga disusun sejalan dengan RKP Tahun 2023.

Kementerian Pertanian memiliki 5 program yang dilaksanakan untuk mendukung langsung terhadap Prioritas Nasional 1.

PRIORITAS NASIONAL Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas Peningkatan ketersediaan, PN₁ akses dan Program nilai tambah dan daya saing PP3 **kualitas** Memperkuat Ketahanan Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Ekonomi untuk Pp6 Pertumbuhan Program pendidikan dan pelatihan yokasi Peningkatan nilai tambah, lapangan Program Dukungan Manajemen PP: **Program Prioritas**

Gambar 13. Lima program Kementerian Pertanian mendukung Prioritas Nasional 1





Strategi Mentan Amran Tingkatkan Produksi

Pertanian



Lakukan Akselerasi Tanam dengan Melakukan Penanaman Cepat/ Tanam Culik



Memberikan Insentif El Nino = berupa bibit dan benih kepada petani



Meningkatkan Indeks
Pertanaman di Rawa
Mineral

Membangun Embung dan Penerapan Rain Water Harvesting System

"Indonesia akan berdaulat dan menjadi negara pengekspor beras di tahun 2027 dengan produksi beras dari lahan itu 10 juta ton dengan syarat dalam setiap tahunnya ada peningkatan lahan 1 juta hektar, sehingga ada penambahan produksi 2,5 juta ton beras setiap tahunnya,"

Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian RI

Pertanian Cemerlang, Indonesia Gemilang

www.pertanian.go.id



1.4. Struktur Organisasi

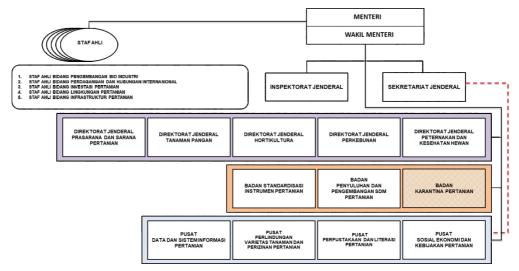
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian dan bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri Pertanian juga dibantu oleh seorang Wakil Menteri Pertanian. Unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 3 (tiga) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri Pertanian, 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri.

Perpres Nomor 117 Tahun 2022 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Permentan Nomor 19 Tahun 2022, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 Juli 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, serta merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh sebab itu, dibentuknya Badan Karantina Indonesia, berdampak pada adanya pengalihan tugas karantina di seluruh kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi perkarantinaan, dan akan diintegrasikan menjadi tugas Badan Karantina Indonesia. Sehingga pada saat Perpres ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini berdampak pada perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian dimana Badan Karantina Pertanian sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Pertanian terhitung sejak Perpres Nomor 45 tahun 2023 berlaku. Namun demikian, secara akuntabilitas kinerja, pada tahun 2023 Badan Karantina Pertanian masih menjadi bagian dari Kementerian Pertanian yang pelaporan kinerjanya masih menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan kinerja Kementerian Pertanian.



Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi Kementerian Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 14.



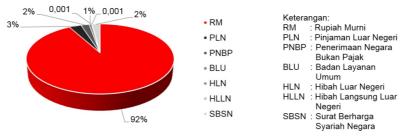
Gambar 14. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian

1.5. Postur Anggaran

Pengembangan sektor pertanian memerlukan dukungan dana yang cukup, yang dapat berasal dari berbagai sumber, baik itu anggaran dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian maupun non APBN Kementerian Pertanian. Sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 06 Tahun 2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian di tingkat daerah.

1.5.1. APBN Kementerian Pertanian

Pagu awal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.318.655.827,-, namun dengan adanya dinamika perubahan sepanjang tahun 2023, sehingga pagu akhir Kementerian Pertanian menjadi Rp14.808.873.722.000,-. Perubahan pagu anggaran sepanjang tahun 2023 terutama disebabkan oleh adanya blokir *Automatic Adjustment*.



Gambar 15. Sumber pendanaan APBN Kementerian Pertanian TA 2023

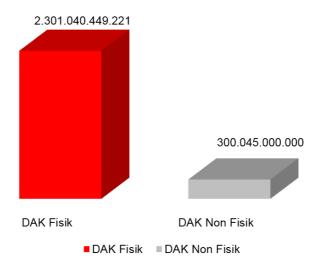


Namun demikian Kementerian Pertanian juga mendorong pembiayaan dari sumber lain dalam rangka pengamanan target nasional sebagai upaya pemulihan ekonomi seperti akselerasi melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), optimalisasi pemanfaatan KUR dan subsidi.

1.5.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung Tematik Penugasan Pengembangan *Food Estate* (7 Kab *FE* dan 41 Kab Penyangga *FE*) dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (100 Kab dan 32 Provinsi). Fokus Penuntasan Infrastruktur fisik Kawasan *Food Estate* dan Penyangganya serta Mendukung MP Korporasi Petani dan Nelayan, yang terpenting dari semua itu adalah Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dari hulu, *on farm* sampai hilir.

Dana Alokasi Khusus terdiri dari dua, yaitu DAK Fisik dan Non Fisik, yang keduanya memiliki kegiatan yang berbeda. Alokasi DAK Fisik Tahun 2023 sebesar Rp2,301,040,449,221 yang kegiatan dan anggarannya ditujukan kepada Perangkat Daerah lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran untuk DAK non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2023 sebesar Rp300.045.000.000,- mendukung penguatan ketahanan pangan dan pertanian mengacu pada kriteria lokasi yang telah ditentukan.



Gambar 16. Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik TA 2023 di Kementerian Pertanian



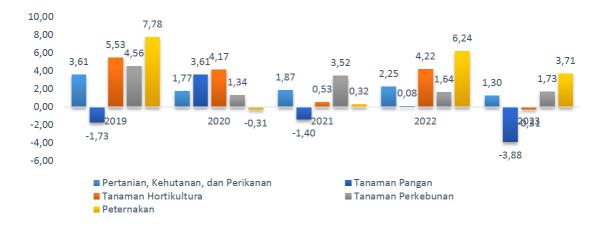


2.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian

Dinamika global yang terjadi serta, upaya pemulihan perekonomian Indonesia, sektor pertanian tetap tumbuh berkontribusi positif terhadap perkembangan Produk Domestik *Bruto* (PDB) nasional. Perkonomian Indonesia tumbuh solid di atas 5 persen (y on y). Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 tumbuh 5,05 persen (c-to-c). Sektor pertanian, sebagai salah satu *leading sector* juga menunjukkan tren pertumbuhan positif pada tahun 2023. Pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,30 persen (c-to-c), sedangkan pertanian sempit mencapai 0,18 persen (c-to-c).

Pertumbuhan sektor pertanian disumbang oleh subsektor peternakan yang tumbuh dengan capaian 3,71 persen, didorong oleh peningkatan produksi unggas dalam negeri dan peningkatan permintaan luar negeri untuk produk ternak unggas dan hasilnya. Subsektor tanaman perkebunan juga tumbuh mencapai 1,73 persen, ditopang oleh peningkatan permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas perkebunan seperti sagu, nilam, dan cengkeh.

Sektor pertanian berada di posisi 5 besar pada distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2023. Data ini tercatat bersamaan dengan lapangan usaha lain seperti industri pengolahan, perdagangan, kontruksi dan pertambangan. Dari sisi lapangan usaha pada triwulan IV 2023 (YonY), seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB salah satunya adalah sektor pertanian, di mana pertumbuhannya mencapai 1,30 persen dan distribusinya sebesar 11,53 persen.



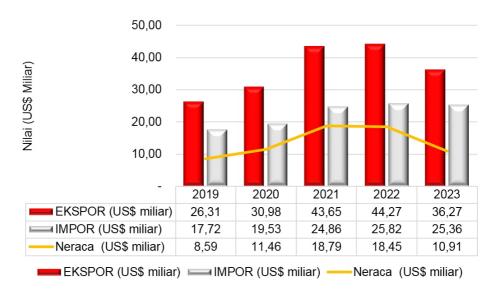
Gambar 17. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023

Kementerian Pertanian akan terus mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian melalui peningkatan produksi dan nilai tambah. Sebagai langkah nyata, Kementan tengah mengembangkan sentra produksi baru pada lahan-lahan suboptimal seperti lahan rawa untuk memperkuat ketahanan pangan.



2.2. Ekspor Impor Produk Pertanian

Neraca perdagangan sektor pertanian baik olahan maupun segar selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan selama kurun waktu 2019-2023 sebesar 13,66%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 64,05 persen.



Gambar 18. Neraca Perdagangan Produk Pertanian Segar dan Olahan Tahun 2019-2023 (US\$ Miliar)

Selama periode 5 tahun terakhir, neraca perdagangan sektor pertanian menunjukkan saldo positif, yang menunjukkan bahwa nilai ekspor melebihi nilai impor (surplus). Nilai neraca perdagangan meningkat dari \$8,59 miliar pada tahun 2019 menjadi puncaknya pada tahun 2021 sebesar \$18,79 miliar. Pada tahun 2023, surplus neraca perdagangan sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya perubahan dalam kebijakan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional seperti tarif atau kuota impor baru, harga komoditas berfluktuasi akibat kendala pada distribusi dan logistik. Selain itu, pemulihan ekonomi dunia pasca hantaman *Covid-19* belum sepenuhnya kembali pada kondisi sedia kala, apalagi sejumlah negara Eropa sebagai salah satu pasar potensial komoditas perkebunan mengalami instabilitas pasokan energi yang akan mengancam keberlangsungan *food security*.

Kontribusi utama neraca perdagangan karena meningkatnya volume ekspor komoditas sub sektor perkebunan, namun demikian seluruh sub sektor pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun peternakan juga mengalami peningkatan.





2.2.1. Perkembangan Ekspor Produk Pertanian

Perkembangan ekspor hasil pertanian dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif baik dari sisi volume maupun nilai. Rata-rata peningkatan nilai ekspor hasil pertanian untuk komoditas segar dan olahan pada kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 sebesar 9,03 persen, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 38,97 persen. Peningkatan nilai ekspor pertanian terjadi pada tahun 2020 hingga 2022.



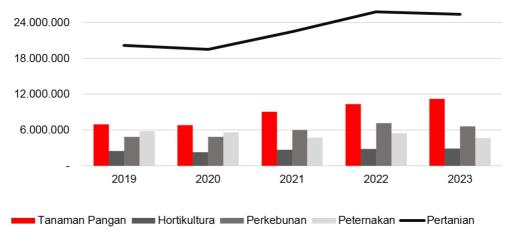
Gambar 19. Perkembangan Nilai ekspor Produk Pertanian Segar dan Olahan Tahun 2019-2023 (USD Ribu Miliar)

Nilai ekspor subsektor pertanian secara umum mengalami peningkatan, namun sub sektor perkebunan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 19,61 persen. Kontribusi terbesar pada ekspor hasil pertanian adalah sub sektor perkebunan jika dibandingkan dengan ekspor subsektor lainnya. Rata-rata kontribusi komoditas perkebunan terhadap nilai ekspor pertanian pada kurun waktu 2019 hingga 2023 adalah sebesar 93,36 persen pertahun, meskipun masih didominasi oleh ekspor kelapa sawit dan turunannya.



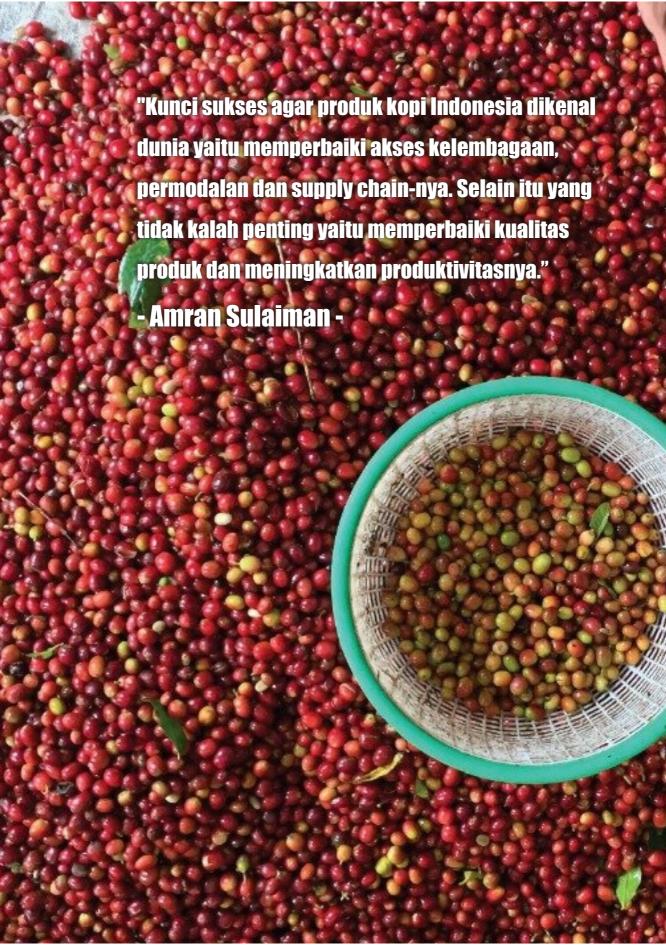
2.2.2. Perkembangan Impor Produk Pertanian

Dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi sendiri atau ada bahan tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri maka terdapat produk yang harus diimpor, seperti produk yang digunakan sebagai bahan baku industri atau untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Importasi produk pertanian baik segar dan olahan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 6,28 persen, yang utamanya didominasi untuk komoditas tanaman pangan. Meskipun peningkatan impor lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan nilai ekspor, namun tetap perlu diperhatikan terutama untuk komoditas strategi yang dapat diproduksi dalam negeri seperti jagung. Selain itu, impor juga banyak dilakukan untuk komoditas kedelai yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.



Gambar 20. Perkembangan Nilai Impor Produk Pertanian Segar dan Olahan Tahun 2019-2023 (USD Ribu Miliar)

Berdasarkan Gambar 20 jumlah impor produk pertanian didominasi pada subsektor tanaman pangan, hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan akan produk tanaman pangan seperti jagung dan kedelai. Kontribusi impor tanaman pangan pada total impor pertanian dengan rata-rata kontribusi sebesar 39,03 persen pertahun.



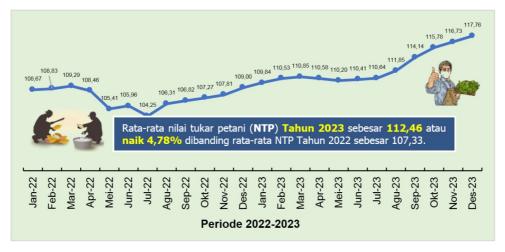




2.3. Perkembangan Nilai Tukar Petani

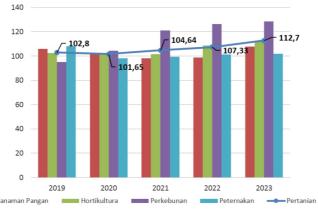
Nilai Tukar Petani (NTP) NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Berdasarkan Gambar 21 dapat dilihat bahwa rata-rata tahunan NTP Sektor pertanian pada kurun waktu tahun 2022-2023 konsisten mengalami peningkatan tiap bulannya. NTP tahun 2022 - 2023 berada di atas 100 yang artinya petani telah memiliki nilai impas atas barang yang dijual/diterima (It) dengan yang dibeli/bayar (Ib). Rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 112,46 mengalami peningkatan 4,78% dibanding rata-rata NTP tahun 2022 sebesar 107,33.



Gambar 21. Perkembangan Nilai Tukar Petani 2022-2023 per bulan

Jika dilihat dari nilai NTP per subsektor tahun 2023, semua subsektor mengalami peningkatan, utamanya sektor tanaman pangan yang meningkat 8,89 persen. Rata-rata peningkatan NTP pertanian selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 2,35 persen.

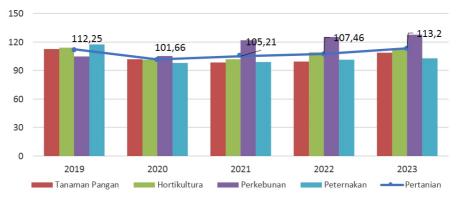


Gambar 22. Perkembangan Rata-rata NTP Sektor Pertanian per subsektor Tahun 2019-2023



2.4. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dengan Indeks Harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat Indeks Harga yang Diterima oleh Petani dibandingkan dengan Indeks Harga Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Perkembangan NTUP per subsektor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

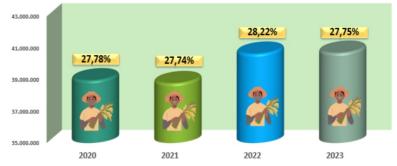


Gambar 23. Perkembangan NTUP per subsektor tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 23 dapat dilihat bahwa rata-rata tahunan NTUP Sektor pertanian pada kurun waktu tahun 2019-2023, mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar -9,43 persen, namun terus konsisten meningkat hingga akhir tahun 2023. Jika dibandingkan nilai NTUP per sub sektor, peningkatan paling signifikan terjadi pada sub sektor perkebunan, sedangkan sub sektor hortikultura dan peternakan juga meningkat meskipun peningkatannya tidak sebesar perkebunan. Untuk sub sektor tanaman pangan, cukup berfluktuasi karena mengalami penurunan pada periode 2019-2021, namun terus meningkat pada tahun 2022-2023.

2.5. Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata-rata 27,94%.



Gambar 24. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2020-2023

Pertanian merupakan sektor lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar yang mencapai 36,46 juta orang pada Agustus 2023. Jumlah ini merupakan 26,07% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya yang berjumlah 139.85 juta orang. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus Tahun 2022 sebesar 35,91 juta orang, maka angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,53% atau sebanyak 548 ribu jiwa. Tenaga kerja tersebut tersebar ke dalam empat subsektor yaitu di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan, pada Bulan Agustus 2023 sebesar 15,02 juta orang (41,21%) dari seluruh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Subsektor ini merupakan subsektor yang paling tinggi menyerap tenaga kerja dibanding subsektor lainnya di lingkup pertanian. Jika dibandingkan dengan periode yang sama Agustus 2022 penduduk yang bekerja di subsektor tersebut mencapai 14,97 juta orang, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,34%. Selanjutnya penduduk yang bekerja di subsektor perkebunan Agusus 2023 sebesar 12,22 juta orang (33,51%) dari total tenaga kerja di sektor pertanian, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Agustus 2022 yang sebesar 12,59 juta orang, maka mengalami penurunan sebesar 2,96%.

Kemudian penduduk yang bekerja di subsektor peternakan mencapai 5,23 juta orang (14,35%) dari total tenaga kerja sektor pertanian, jika dibandingkan dengan periode yang sama Agustus 2022, jumlah tenaga kerja subsektor peternakan yang berjumlah 4,48 juta orang meningkat sebesar 16,71%. Lalu jumlah penduduk yang bekerja di subsektor hortikultura Agustus 2023 sebesar 3,99 juta orang (10,93%) dari total tenaga kerja sektor pertanian, jika dibandingkan dengan periode yang sama Agustus 2022 sebanyak 3,86 juta orang, meningkat sebesar 3,11%.

Namun demikian, dengan jumlah tenaga kerja yang besar tersebut, ternyata sektor pertanian sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) pada tahun 2023 hanya mampu memberikan kontribusi PDB nasional pada triwulan III 2023 sebesar 10,19% (angka sangat sangat sementara dengan tahun dasar (2010)). Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih rendah. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan adopsi teknologi.

Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, yang akhirnya mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar langkah-langkah yang diambil dapat sesuai dengan sasaran yang diharapkan.



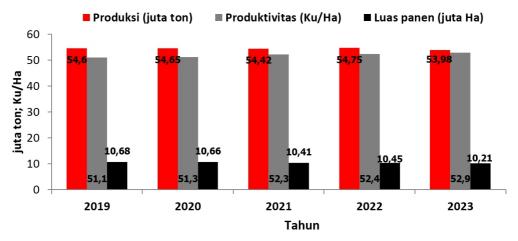
2.6. Produksi Komoditas Strategis Dalam Negeri

2.6.1. Tanaman Pangan



Untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi nasional, maka dilakukan melalui kegiatan optimalisasi budidaya, pemanfaatan varietas unggul dan pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil KSA-BPS angka sementara hasil amatan bulan Desember 2023, produksi padi tahun 2023 adalah 53,98 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2023 ini mengalami penurunan 1,40% dari produksi Tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun.

Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada Gambar 25.



Sumber: Angka Sementara KSA BPS amatan Desember 2023

Gambar 25. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2019-2023

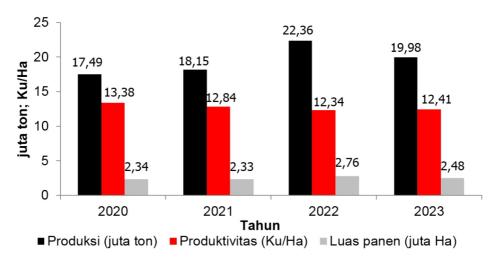
Peningkatan produksi dan produktifitas tentunya akan berbeda-beda pendekatannya sesuai dengan kondisi agroekosistem wilayahnya. Penguatan budidaya padi dilakukan dengan pengembangan beberapa jenis padi seperti: padi biofortifikasi, Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) Padi, Padi Lahan Kering, Demplot Padi SAHAJA (Salibu-Hazton-Jajar Legowo), Padi Rawa, Padi Ramah Lingkungan, Budidaya Padi Bioremediasi, Pengembangan Budidaya Padi Intensif Hara Berimbang, dan Budidaya Biopresisi (Akurasi Berimbang) Selain pengembangan berbagai jenis padi yang disesuaikan dengan lingkungannya, penguatan budidaya padi juga dilakukan optimalisasi peningkatan Indeks Pertanaman (IP).





b. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2023 (dengan kadar air 27%) mencapai 19,98 juta ton yang dihitung berdasarkan KSA BPS. Produksi tahun 2023 mengalami penurunan 2,37 juta ton atau 10,61% terhadap produksi jagung 2022. Gambar 26 memperlihatkan bahwa produksi, produktivitas dan luas panen jagung mengalami fluktuasi selama 2019-2023.



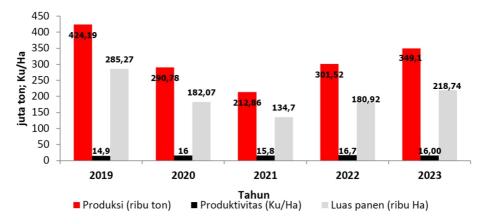
Gambar 26. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2020-2023

Untuk meningkatkan produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan maupun pangan, melalui optimalisasi budidaya, penggunaan varietas unggul, teknologi budidaya dan perluasan areal tanam baru. Penguatan budidaya jagung, peningkatan produksi dan produktivitas jagung dilakukan dilakukan pengembangan jagung wilayah khusus, jagung untuk pangan, food estate jagung, dan pengembangan sorgum.



Berdasarkan angka produksi kedelai yang merupakan angka estimasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, produksi kedelai tahun 2023 mencapai 0,35 juta ton. Produksi kedelai tahun 2023 mengalami peningkatan 15,78% dibandingkan tahun 2022.

Pada tahun 2019-2023, produksi kedelai mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Utamanya pada tahun 2023, luas panen dan produksi kedelai mengalami peningkatan, begitupun dengan luas produktivitas kedelai dalam 5 tahun terakhir juga menunjukkan angka positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,89%. Perkembangan Produksi Kedelai Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2019-2023

Upaya untuk penguatan budidaya tanaman pangan juga didukung dengan mitigasi risiko gagal panen melalui pengelolaan perlindungan tanaman. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan organisme penganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI). Kegiatan ini dilakukan melalui 10 kegiatan pendukung.



Gambar 28. Kegiatan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan



Dalam rangka mensukseskan dukungan sektor pertanian dalam pembangunan nasional, salah satu program yang difokuskan Kementerian Pertanian adalah peningkatan ketersediaan pangan melalui penggunaan benih bersertifikat, serta menjadi program prioritas nasional tahun 2020 – 2024. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan sendiri bertujuan untuk mewujudkan sistem penyediaan benih tanaman pangan yang tangguh dan berdaya saing tinggi yang berbasis potensi nasional yang mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna benih. Kemudian untuk mewujudkan program prioritas nasional terkait perbenihan tanaman pangan tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kebijakan, seperti Pengembangan/Perbanyakan Benih Sumber, Sertifikasi Produk Benih, Pengawasan Peredaran Benih, dan Penyaluran Benih.

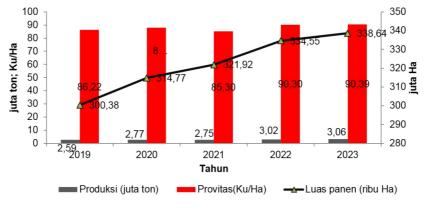
2.6.2. Hortikultura

Pengembangan hortikultura pada Tahun 2023 dilakukan melalui pengembangan kampung hortikultura, penumbuhan UMKM Hortikultura dan modernisasi pertanian. Pengembangan kampung hortikultura dilakukan dengan pengembangan kampung buah-buahan, kampung sayuran dan kampung tanaman obat. Penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan dengan pemberian bantuan sarpras pascapanen dan pengolahan bawang, cabai, buah-buahan dan sayuran lainnya. Sedangkan modernisasi pertanian dilakukan melalui pengembangan Smart Farming, Sistem Informasi (SI) sebagai early warning system (EWS) komoditas strategis, registrasi kampung hortikultura, simethris, perbenihan horti, Gerdal horti, digitalisasi standar mutu dan sistem monev dan pengawalan hortikultura Indonesia.



Produksi cabai pada tahun 2023 sebesar 3,06 juta ton meningkat 1,32% dibanding produksi tahun 2022 sebesar 3,02 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami peningkatan produksi 5,33%, sedangkan cabai rawit mengalami penurunan sebesar 2,44%.

Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas cabai nasional dapat dilihat pada Gambar 29.



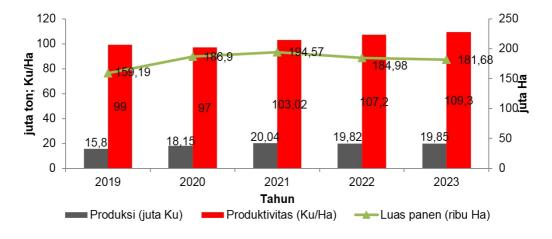
Gambar 29. Produksi Cabai Tahun 2019 – 2023





Produksi bawang merah pada tahun 2023 sebesar 1,985 juta ton mengalami peningkatan 0,14% dibanding produksi tahun 2022 sebesar 1,982 juta ton.

Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas bawang merah nasional dapat dilihat pada Gambar 30.

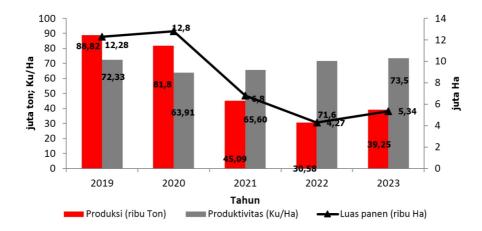


Gambar 30. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2019 – 2023





Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2023 mencapai 39.254 ton atau mengalami peningkatan 28,35% dari produksi tahun 2022 sebesar 30.582 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Produksi Bawang Putih (Ton) Tahun 2019 – 2023

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian mengalokasikan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura strategis meliputi: kawasan bawang merah seluas 8.985 ha, kawasan aneka cabai seluas 7.180 ha, dan kawasan bawang putih seluas 800 ha. Dalam pengembangan kawasan tersebut, Kementan juga bekerja sama dengan para *champion* cabai dan bawang merah di berbagai sentra produksi. Diharapkan dari kerjasama tersebut, dapat berkontribusi dalam pemenuhan pasokan dan pengendalian inflasi di berbagai daerah khususnya yang mengalami defisit. Pengembangan Kawasan/Kampung tersebut didukung dengan kegiatan seperti pengendalian OPT ramah lingkungan, sarana dan prasarana pascapanen, serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan dalam monitoring serta pengontrolan kualitas. Pengawalan dan pendampingan secara intensif juga akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.
- Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara offline maupun online dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat.
- Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya.

- ▶ Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan.
- Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food Estate/ Agroindustri).
- Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah.
- ▶ Menyusun Early Warning System (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan ke depan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan ke depan.
- ▶ Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah.
- ▼ Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan Simethris.
- Menyalurkan fasilitasi alat mesin dan prasarana pertanian. Untuk TA 2023 berupa *cultivator* sebanyak 11 unit, pompa air sebanyak 8 unit, *power sprayer* dan mesin diesel sebanyak 4 paket serta *green house* sederhana sebanyak 4 unit dan sumur dangkal sebanyak 7 unit. Fasilitasi tersebut diberikan khusus di daerah *Champion* sebagai langkah stabilisasi pasokan cabai.

2.6.3. Peternakan

Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa komoditas peternakan strategis, yaitu daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, daging babi, daging itik, susu, dan telur. Perkembangan produksi peternakan strategis disajikan pada Tabel.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2019-2023

No.	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	% Peningkatan 2022/2023
1.	Daging Sapi (Ribu Ton)	378,25	339,75	365,51	374,43	377,28	0,76
2.	Daging Kerbau (Ribu Ton)	18,57	13,88	19,19	16,54	16,57	0,18
3.	Daging Kambing (Ribu Ton)	49,42	41,86	40,52	41,22	41,59	0,90
4.	Daging Domba (Ribu Ton)	47,92	37,05	34,67	35,67	36,24	1,60
5.	Daging Babi (Ribu Ton)	159,42	189,55	175,99	102,48	104,24	1,72
6.	Daging Ayam Buras (Ribu Ton)	292,33	270,21	269,80	276,73	280,73	1,45
7.	Daging Ayam Pedaging (Ribu Ton)	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.668,88	3.997,65	8,96
8.	Daging Itik (Ribu Ton)	39,81	35,75	41,02	44,65	44,65	0,00
9.	Susu (Ribu Ton)	944,54	947	946	824	837	1,57
10.	Telur (Ribu Ton)	5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.886,99	8,63
Rata-rata Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2023							7,66

Keterangan: *) Angka Sementara; produksi daging dalam meatyield.

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024









Rata-rata peningkatan produksi komoditas peternakan tahun 2023 sebesar 7,66 persen didukung oleh upaya-upaya strategis berikut ini:

UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI DAGING

- Optimalisasi Reproduksi melalui layanan Inseminasi Buatan sebanyak 3.170.143 akseptor dengan jumlah kelahiran sebanyak 2.322.383 ekor pada tahun 2023.
- Pengembangan ternak ruminansia potong T.A. 2023 berupa bantuan ternak pemerintah 11.401 ekor sapi potong lokal/persilangan, 200 ekor kerbau, dan 14.000 ekor kambing/domba.
- Pengembangan unggas dan aneka ternak T.A. 2023 berupa bantuan ternak pemerintah 185.000 ekor ayam, 40.000 ekor itik, dan 1.300 ekor babi.
 Sertifikasi benih semen beku tahun 2023 sebanyak 180 bull sapi setara 2.700.000 straw, 4 bull
- Sertifikasi benih semen beku tahun 2023 sebanyak 180 bull sapi setara 2.700.000 straw, 4 bull kerbau setara 60.000 straw dan 25 kambing/domba setara dengan 175.000 straw, serta embrio sebanyak 800 embrio.
- Sertifikasi bibit tahun 2023 terdiri dari bibit sapi potong sebanyak 1.167 ekor dan ayam ras pada 16 produsen.
- Layanan kesehatan hewan utamanya pada penanganan dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- Mendorong sumber pembiayaan selain APBN seperti akses Kredit Usaha Rakyat, kerja sama investasi antar negara dan swasta yang berskala ekonomi dan masif.



UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI SUSU

- Optimalisasi Reproduksi yang telah menghasilkan pedet sapi perah sebanyak 425.284 ekor selama tahun 2019-2023 berdasarkan Pelaporan pada iSIKHNAS.
- Pengembangan ternak sapi perah T.A. 2023 berupa bantuan ternak pemerintah sebanyak 440 ekor.
- Produksi bibit sapi perah pada tahun 2023 sebanyak 558 ekor.
- Pemasukan bibit sapi perah sebanyak 9.215 ekor selama tahun 2019-2023.
 Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan susu
- sebanyak 5 (lima) unit pada tahun 2023.

 Layanan kesehatan hewan utamanya pada
- Layanan kesehatan hewan utamanya pada penanganan dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- Mendorong sumber pembiayaan selain APBN seperti akses Kredit Usaha Rakyat, kerja sama investasi antar negara dan swasta yang berskala ekonomi dan masif.



UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI TELUR

- Pengembangan ternak ayam lokal T.A. 2023 berupa bantuan ternak pemerintah sebanyak 185.000 ekor.
- Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.
- Koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendata peternak layer untuk calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
- Layanan kesehatan hewan utamanya pada penanganan dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- Mendorong sumber pembiayaan selain APBN seperti akses Kredit Usaha Rakyat, kerja sama investasi antar negara dan swasta yang berskala ekonomi dan masif.



Gambar 32. Strategi peningkatan produksi komoditas peternakan tahun 2023





2.6.4. Perkebunan

Subsektor perkebunan saat ini fokus untuk mencapai tujuan yaitu produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional. Tujuan jangka menengah perkebunan dibuat dikarenakan adanya beberapa faktor utama di antaranya (1) pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan meningkat, dan (2) ekspor produk perkebunan yang meningkat. Untuk mencapai tujuan jangka menengah perkebunan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menentukan arah kebijakan sistem perbenihan di antaranya (1) benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan, dan (2) efisiensi budidaya tanaman perkebunan. Kebijakan tersebut ditentukan berdasarkan (1) basis penelitian, dan (2) reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan 2020-2024. Tujuan jangka menengah 2020-2024 Ditjen Perkebunan dapat dilihat pada Gambar 33 di bawah ini.

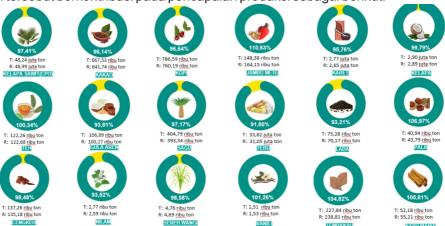


Gambar 33. Tujuan Jangka Menengah 2020-2024 Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian terus berupaya mencari solusi demi meningkatkan produksi/produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk komoditas perkebunan. Atas dasar itulah perkebunan bioindustri dibangun. Perkebunan bioindustri ini dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi modern dan dicirikan dengan penggunaan varietas unggul, efisien, efektif dan integratif, sustainable waste, ecofriendly, menerapan GAP dan GHP, mekanisasi pertanian serta pemanfaatan Internet of Things (IoT). Demi mewujudkan perkebunan bioindustri, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan reorientasi pada program dan manajemen. Reorientasi dimaksud seperti Program, dimana dilakukan penguatan logistik perkebunan melalui penguatan nursery dan mendorong perbenihan mandiri. Kemudian dilakukan pengembangan komoditas berbasis kawasan baik kawasan tanaman tahunan dan penyegar maupun kawasan tanaman semusim dan rempah. Selain itu dilakukan pula upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OTP), serta peningkatan mutu dan pengembangan produk perkebunan. Upaya pemerintah dalam pengembangan perkebunan nasional dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- ▶ Logistik benih dan pengembangan kawasan melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi untuk meningkatkan produksi komoditas (program jangka panjang) kelapa, jambu mete, kakao, karet, lada, cengkeh, teh, vanili, dan kayu manis.
- Pengembangan kawasan melalui Intensifikasi (program jangka pendek) untuk **meningkatkan produksi** kopi, kakao, karet, lada, pala dan cengkeh.
- Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing melalui penyediaan alat pasca panen dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi kopi, karet, kelapa, kakao, pinang, kayu manis, dan nilam.
- ▼ Skema pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN/APBD, pemanfaatan KUR dan *CSR* serta investasi.

Penguatan budidaya tanaman perkebunan di Ditjen Perkebunan pada tahun 2023 dilakukan pada 18 (delapan belas) komoditas diantaranya kelapa sawit, kopi, jambu mete, kakao, karet, kelapa, tebu, lada, cengkeh, dan pala. Penguatan budidaya dilakukan dengan mendukung kegiatan peremajaan, perluasan, rehabilitasi, serta fasilitasi alat pengolahan dan pascapanen pada komoditas perkebunan tersebut. Penguatan budidaya tanaman perkebunan pada komoditas perkebunan tersebut berkontribusi pada pencapaian produksi sebagai berikut.



Gambar 34. Target dan Realisasi Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2023

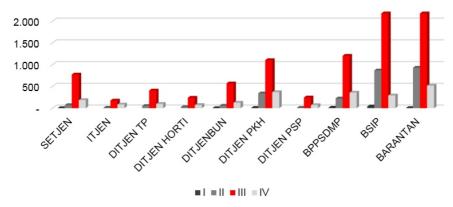




3.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

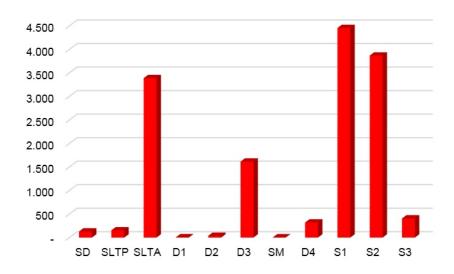
3.1.1. Manajemen SDM Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 14.380 orang pegawai yang tersebar di 9 Unit Kerja Eselon I termasuk 162 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan Golongan, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 61 orang, golongan II sebanyak 2.584 orang, golongan III sebanyak 9.554 orang, dan golongan IV sebanyak 2.181 orang.



Gambar 35. Sebaran pegawai berdasarkan golongan pada unit kerja Eselon I Tahun 2023

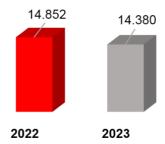
Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 406 orang, S2 sebanyak 3.868 orang, S1/D4 sebanyak 4.774 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.662 orang, SLTA sebanyak 3.388 orang, serta SLTP/SD sebanyak 282 orang.



Gambar 36. Sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2023

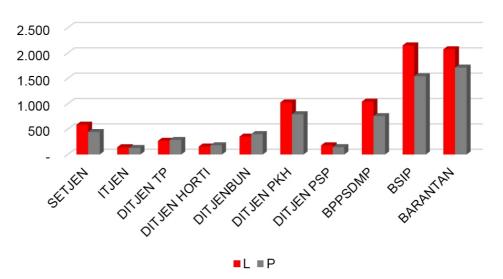


Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 (14.852 orang) mengalami pengurangan sebanyak 472 orang atau 3,18%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya mutasi pegawai (reorganisasi BSIP), pensiun, dan meninggal dunia.



Gambar 37. Perbandingan jumlah pegawai tahun 2022-2023

Jika dibandingkan antara pegawai laki-laki dan perempuan, jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 7.984 dan pegawai perempuan sebanyak 6.396.



Gambar 38. Sebaran jumlah pegawai laki-laki dan perempuan pada unit kerja Eselon I tahun 2022-2023

Selain didukung oleh pegawai berstatus PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai ASN dan non ASN di lapangan, yaitu ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 78 orang pada tahun 2023, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 1.744 orang, penyuluh swadaya sebanyak 26.957 orang, dan penyuluh swasta sebanyak 502 orang.

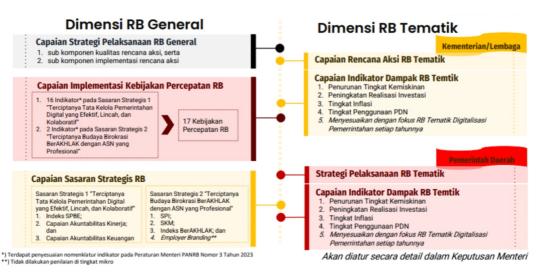


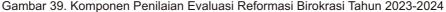
3.1.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2021-2024.Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 merupakan periode ke tiga yang ditandai dengan terbitnya Permentan RB Nomor 25 tahun 2021. Dengan ditetapkannya Permentan RB nomor 25 tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi. Selanjutnya pada tahun 2023, diterbitkan: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, (2) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi RB Tahun 2023, dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, sehingga terdapat perubahan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Komponen penilaian evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023-2024 menggunakan dua pendekatan yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Secara rinci, komponen penilaian evaluasi RB untuk tahun 2023-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar 39.







Pada tahun 2023, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 24 kegiatan utama, yaitu:

- Penyederhanaan Birokrasi
- Pelaksanaan data statistik sektoral
- model fleksibel bagi ASN
- Pelaksanaan sistem kerja baru dengan () Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Pelaksanaan arsitektur SPBE Kementan
- Penguatan pengelolaan keuangan dan aset
- Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi
- Penataan Jabatan Fungsional (JF)
- Pelaksanaan pelayanan publik digital
- Penguatan manajemen talenta ASN
- Pembangunan ZI di unit kerja
- Pelaksanaan Learning of Development serta mindset ASN
- Penguatan implementasi SPIP
- Pelaksanaan transformasi digital ASN
- masyarakat
- Penguatan pengelolaan pengaduan (2) Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital
- Penguatan upaya pencegahan korupsi
- Pengelolaan kinerja pegawai ASN
- Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik
- Penguatan sistem merit
- Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik
- Pelaksanaan core values ASN

Pelaksanaan arsip digital

Pelaksanaan pelayanan publik prima

Proses evaluasi RB dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan utama yaitu evaluasi perencanaan RB dan evaluasi pelaksanaan RB. Evaluasi perencanaan RB dilakukan untuk memastikan road map dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D. Evaluasi pelaksanaan RB dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam road map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di internal Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi, yang dalam hal ini untuk lingkup Kementerian Pertanian, evaluasi internal RB dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Proses evaluasi internal RB Kementerian Pertanian tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal secara triwulanan. Hasil penilaian akhir pada TW IV disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023 Nomor. B.749/OT.240/G/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024. Evaluasi internal dilakukan melalui

konfirmasi, klarifikasi, telaah dan analisis, serta diskusi/ wawancara dengan penanggungjawab kegiatan utama RB untuk memastikan kesesuaian (*relialibility*) dan kebenaran (*validity*) dokumen (*evidence*) guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di Kementerian Pertanian termasuk Sekretariat Jenderal.

Secara umum, seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam *Road Map* RB Nasional telah ditetapkan dan dijabarkan pada Road Map RB Kementan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis RB sebagai berikut:

- Melakukan percepatan Revisi III Rencana Strategis (Renstra) Kementan 2020-2024 dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
- Pohon Kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Succes Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logia yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum mengambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Komitmen dan upaya organisasi dalam percepatan RB melalui pembangunan ZI-WBK/WBBM sudah baik, meskipun tingkat keberhasilan di tingkat nasional masih rendah, khususnya untuk unit kerja yang mendapat predikat unit kerja WBBM.
- Inovasi dan praktik baik pelayanan yang telah dkembangkan oleh unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik belum dilakukan pemetaan dan dianalisis hasil (outcome) dan manfaat (benefit) yang dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder.
- Masih terdapat beberapa rencana aksi RB General yang belum didukung anggaran yang memadai, antara lain kegiatan penyusunan kebijakan sistem kerja lingkup Kementan.
- Hasil evaluasi pelaporan kinerja periodik menunjukkan bahwa terdapat IKU yang belum selaras antara JPT, JA, dan JF.

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2023 adalah sebesar 79,64. Nilai RB tersebut merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB tahun 2023, yang disampaikan oleh Kementerian PAN RB secara daring pada tanggal 6 Februari 2024 dan juga melalui portal Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

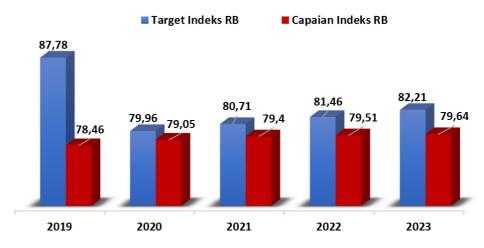
Tabel 2. Rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2023

No.	Dimensi	Nilai
1.	RB General (Skala 1-100)	74,73
2.	RB Tematik (Skala 1-10)	4,91



Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,13 dari capaian tahun 2022 sebesar 79,51. Pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dijabarkan pada Gambar 40.





Gambar 40. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023

Meskipun terjadi peningkatan indeks RB Kementan tahun 2023, namun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Untuk itu perlu segera ditindaklanjuti terkait catatan dan rekomendasi dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Instansi Meso selaku penilai RB Kementerian sehingga nilai RB pada periode selanjutnya menjadi lebih baik. Catatan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain:

- Menyusun rencana aksi RB General dan/atau Tematik tahun 2024 dengan mencantumkan kegiatan utarma, target yang relevan, terukur, dan mengacu pada catatan rekomendasi hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2023; dan
- Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan rencana aksi RB secara berkala (triwulanan dan tahunan).



"Saya tidak suka basa basi yang penting capai prestasi. Karena itu saya minta tingkatkan kualitas kerjanya dan untuk merah putih jangan ada yang mainmain di sektor pertanian."

- Amran Sulaiman -



3.2. PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

3.2.1. Sumberdaya Manusia Pertanian Tahun 2023

Sumberdaya manusia pertanian memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan sektor pertanian. Jumlah sumberdaya manusia pertanian saat ini sebanyak 879.044 individu yang terlibat dalam berbagai aspek pembangunan pertanian di Indonesia. Pentingnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata. Kualitas sumberdaya manusia pertanian tercermin dalam kemampuan mereka untuk menerapkan praktik-praktik pertanian yang modern, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktik-praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sedangkan kuantitas sumberdaya manusia pertanian mencerminkan tingkat keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi tidak akan terwujud tanpa ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memadai. Sumberdaya manusia pertanian yang terampil, terlatih, dan terdidik dengan baik akan mampu menghadapi tantangan yang ada, mengadopsi teknologi-teknologi baru, serta berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian, baik dari segi pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan karir, sangat penting untuk memastikan bahwa sektor pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selin itu, aspek penyuluhan juga menjadi penting untuk dilakukannya *transfer knowledge* kepada petani. Dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian, Indonesia dapat memastikan bahwa sektor pertaniannya menjadi lebih tangguh, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Tabel 3. Kelembagaan Penyuluhan Tahun 2023

No.	Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah (orang)
1.	Kelompok Tani (Poktan)	729.345
2.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	64.579
3.	Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	13.001
4.	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	5.829
	Jumlah	812.754

Tabel 4. Ketenagaan Pertanian Tahun 2023

Sumber: Pusat Pelatihan Pertanian, 2023

No.	Ketenagaan Penyuluhan	Jumlah (orang)
1.	Penyuluh PNS	24.607
2.	Penyuluh PPPK	12.480
3.	THL-TBPP	1.744
4.	Penyuluh Swadaya	26.957
5.	Penyuluh Swasta	502
	Jumlah	66.290

Sumber: Pusat Penyuluh Pertanian, 2023





3.2.2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2023

Pelatihan pertanian menjadi salah satu sasaran dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang didorong dengan menggerakkan beberapa program andalan Pelatihan Pertanian. Pertama, program Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) menjadi fokus utama, dengan mengusung beberapa inisiatif seperti Gerakan Tani Pro Organik (GENTA ORGANIK), adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap fenomena *El Nino*, pertanian ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, serta peningkatan produktivitas padi pada musim rendeng 2023/2024.

Kedua, program *Training of Trainer (TOT)* menargetkan penguatan kapasitas para penyuluh pertanian dan pengelola pupuk bersubsidi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Fokus pelatihan ini mencakup manajemen pupuk bersubsidi dan penerapan teknologi pertanian presisi dengan sumber daya yang terjangkau. Capaian peserta dalam program ini mencapai 108,40% dari target awal.

Ketiga, kegiatan pelatihan tahun 2023 menitikberatkan pada berbagai aspek pembinaan, antara lain pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, pelatihan tematik, pelatihan dasar fungsional, dan bimbingan teknis (Bimtek). Capaian kinerja kegiatan pelatihan ini mencapai 100% dari target sasaran peserta yang berjumlah 12.378 individu.

Keempat, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) menjadi fokus utama dalam memperkuat infrastruktur dan sarana pendukung di 99 P4S yang telah terklarifikasi pada tahun 2023. Peningkatan sarana tersebut melibatkan berbagai upaya penguatan, baik dari segi infrastruktur maupun pengelolaan P4S secara keseluruhan.









Gambar 41. Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Tahun 2023



Kelima, program "Peningkatan Kapasitas melalui Magang Petani Muda di Luar Negeri" ditujukan ke Jepang dan Taiwan. Program ini berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100% dari target awal yang mencakup 2.587 orang peserta. Keenam program "Sertifikasi Tahun 2023" dilaksanakan di Pusat Pelatihan Pertanian dengan mencapai capaian kinerja sebesar 112% dari target yang ditetapkan, melibatkan 580 orang peserta. Ketujuh, kerjasama luar negeri dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) melalui program "Rural Empowerment of Agriculture Scaling up Initiative (READSI)" bertujuan untuk pengembangan pertanian dan peningkatan mata pencaharian di pedesaan. Program ini dilaksanakan di 5 provinsi, 13 kabupaten, dan 144 desa. Sasaran kegiatan READSI adalah memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan, baik secara individu maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan nonpertanian serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Capaian kinerja program ini mencapai 100% dari semua kegiatan dan sasaran yang ditetapkan. Dana yang dialokasikan untuk program ini melalui pinjaman adalah sebesar USD 39.885.000 (sekitar IDR 558.390.000.000), dengan alokasi dana pusat sebesar IDR 192.753.000.000 dan dana daerah sebesar IDR 365.638.000.000.

Melalui beragam program dan kegiatan yang dilakukan, BPPSDMP bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor pertanian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

Tabel 5. Capaian Program PHLN-READSI Tahun 2023

No.	Kelembagaan Penyuluhan	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan
1.	Jumlah sasaran dilatih dalam literasi keuangan dan/atau sasaran yang menggunakan produk dan layanan keuangan	Petani	61.200	61.200	100%
2.	Fasilitasi rumah tangga sasaran dalam meningkatkan kualitas gizinya	Rumah Tangga	42.750	42.750	100%
3.	Peningkatan kompetensi sasaran di bidang teknologi budidaya	Petani	32.850	32.850	100%
4.	Tersedianya Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	UPJA	342	342	100%
5.	Jumlah bantuan	Poktan	2.394	2.394	100%
6.	Peningkatan kapasitas dan bantuan pengembangan usaha bagi petani termasuk cocoa doctor di Sulawesi (telah tersalurkannya bantuan pengembangan bagi <i>Cocoa Doctor</i>)	Paket	41	41	100%
	Rata-rata	729.345	729.345	100%	













Gambar 42. Kegiatan Program Rural Empowerment of Agriculture Scaling up Initiative (READSI)

Tahun 2023

3.2.3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2023

a. Kegiatan Penyuluhan

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan dan ketenagaan dalam penyuluhan pertanian. Program inovatif yang mencakup metode penyuluhan di era teknologi informasi dan komunikasi dilakukan sepanjang tahun 2023, sebagai upaya menyentuh sasaran yang lebih luas. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan penyuluhan oleh Kementerian Pertanian menggelar program online seperti "Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian", "Ngobrol Asyik Penyuluhan/NGOBRAS", *podcast* melalui inisiatif "NGEPOD" untuk menyampaikan informasi pertanian secara lebih interaktif.

Penguatan penyuluhan juga dilakukan dengan metode Sekolah Lapang (SL) Tematik Genta Organik Tahun 2023. Pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) Tematik Pertanian Organik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani sehingga mampu membuat dan menggunakan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, pestisida alami, pembenah tanah, pestisida nabati, serta penerapan pembenah tanah. Selain itu mengurangi mampu mengurangi pemakaian pupuk kimia sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas komoditas di lokasi SL dengan rata-rata peningkatan sebesar 1-2 ton/ha.





Gambar 43. Metode Penyuluhan Pertanian Melalui Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Tematik Genta Organik Tahun 2023

Program ini tidak hanya mengedepankan pembelajaran lapangan tetapi juga membangun 1.020 titik demplot untuk pembuatan pupuk, pupuk hayati, dan/atau pembenah tanah, dengan tujuan menciptakan desain model program penyuluhan yang holistik.



Gambar 44. Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2023



Kegiatan SL Tematik Pertanian Organik juga dilakukan berupa penerapan percontohan teknologi Melalui yang diikuti oleh 3.060 petani dari 1.020 kelompok tani. Kegiatan ini dilaksanakan di 102 BPP pada 33 provinsi. Bentuk kegiatannya berupa pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam penerapan pertanian organik. Materi pembelajaran yang diberikan yaitu pembuatan:

- Pupuk organik padat dan cair
- Pembuatan pupuk hayati dengan menggunakan mikroorganisme lokal (MOL);
- Pembenah tanah Biochar dengan memanfaatkan sekam padi;
- Pestisida alami.
- Selain itu, SL juga menyampaikan proses perizinan dan komersialisasi produk.

Penguatan penyuluhan juga dilakukan melalui penguatan materi dan informasi penyuluhan pertanian melalui *Cyber extention (Cybext)* berupa Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian melalui media internet untuk menyediakan materi dan informasi dalam rangka mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku lainnya seperti petani dan lainnya.

Integrasi Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) versi 2022 (https://simluh.pertanian.go.id) telah terintegrasi melalui webservice Ditjen Dukcapil yaitu aplikasi SIAK.



Data utama yang dipadankan:

- 1. NIK
- 2. Nama Lengkap
- 3. Tempat Lahir
- 4. Tanggal Lahir
- 5. Jenis Kelamin

Gambar 45. Simluhtan yang telah terintegrasi melalui webservice Ditjen Dukcapil

Pemanfaatan sistem informasi juga dilakukan untuk beberapa sistem pelaporan untuk memudahkan pencatatan data dan informasi, pemanfaatan dan penggunaan data. Aplikasi yang digunakan diantaranya: *e-Pusluh* untuk pelaporan kegiatan penyuluhan pertanian, *e-reporting*.



Pekan Nasional (PENAS) Tahun 2023 bertujuan memantapkan penguatan potensi dan posisi tawar komoditi lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. PENAS dilaksanakan pada Tanggal 10-15 Juni 2023 bertempat di Lapangan Udara (LANUD) Sutan Sjahrir Kota Padang Sumatera Barat. Jumlah total peserta adalah 28.000.

orang terdiri dari 26.700 orang peserta dan 1.300 orang undangan terdiri dari Menteri dan Pejabat Tinggi K/L; DPR dan DPD RI; Gubernur dan Bupati; DPRD I dan II; Perwakilan Pengurus organisasi Petani dan Profesi; BUMN/Swasta (Mitra KTNA).



Gambar 46. Kegiatan Pekan Nasional (PENAS) di Lapangan Udara (LANUD) Sutan Sjahrir Kota Padang Sumatera Barat, Tanggal 10-15 Juni 2023

c. Pengawalan dan Pendampingan

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian di Lokasi Gernas Penanganan Dampak *El Nino* Tahun 2023. Peran penyuluh pertanian mengawal Program Gernas Penanganan Dampak *El Nino* di 10 provinsi dan 115 kabupaten adalah memastikan ketersediaan sarana produksi, transfer inovasi teknologi pertanian dan melakukan pendampingan kepada petani untuk memastikan usaha tani yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.



Gambar 47. Kegiatan Pengawalan Dan Pendampingan Penyuluh Pertanian di Lokasi Gernas *El Nino* Tahun 2023





Gambar 48. Kegiatan pembinaan penyuluh, petani, dan babinsa oleh Presiden dan Menteri Pertanian Tahun 2023

Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian



Gambar 49. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Tahun 2023



Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan integrasi dari 4 Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.

Pada proyek yang didanai dengan pinjaman dari *World Bank* dan *Asian Infrastructure Investment Bank* ini, setiap K/L memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, seluruh kegiatan pada K/L yang terlibat diharapkan akan berkontribusi pada tujuan utama proyek, yaitu peningkatan pelayanan irigasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan skema irigasi. Dalam hal peningkatan pelayanan irigasi, ada dua indikator sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan, yaitu area yang terfasilitasi dengan layanan irigasi/drainase baru atau direhabilitasi dan persentase intensitas pertanaman (IP).

Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit pelaksana proyek tingkat nasional (National Project Implementation Unit atau NPIU) dipercaya untuk mendorong indikator capaian peningkatan IP dari 180% menjadi 200%. Untuk mencapai tujuan tersebut, NPIU BPPSDMP menyusun pendekatan menggunakan teknologi budidaya Pertanian Cerdas Iklim atau *Climate Smart Agriculture (CSA)*. Penerapan metode *CSA* diklaim mampu meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian meski di tengah iklim yang berubah sekaligus memastikan pertanian berkelanjutan.

Penerapan *CSA* merupakan suatu pendekatan yang mentransformasikan dan mengorientasi ulang sistem produksi pertanian dan rantai nilai pangan guna mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan *CSA* yaitu untuk meningkatkan produksi, produktifitas dan Indeks Pertanaman (IP), meningkatkan pendapatan Petani, dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penerapan teknologi *CSA* tahun 2023 dilaksanakan dengan sasaran Petani/Poktan yang berafiliasi dengan P3A/GP3A di 10 provinsi, 24 kabupaten, dan 117 BPP, sedangkan jumlah kecamatan disesuaikan kondisi lapangan (1 BPP dapat meliputi 1 atau beberapa kecamatan) dengan ketentuan tertentu dengan total diikuti oleh 2.080 kelompok tani. Penerapan teknologi *CSA* diutamakan pada komoditas padi dan komoditas non padi yang memiliki nilai ekonomi tinggi sesuai kondisi lapangan (spesifik lokasi).

















Gambar 50. Kegiatan Lapangan Strategic Irrigation Modernization And Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) Tahun 2023





Integrated Participatory Development & Management Of Irrigation Program (IPDMIP) dikelola oleh Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri, dirancang untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. Pencapaian Outreach, Dampak, Outcome Dan Output Sesuai Logframe (Berdasarkan supervise PCR IFAD) Program PHLN Integrated Participatory Development & Management Of Irrigation (IPDMIP) Tahun 2023 mencapai 101% (Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2023).

3.2.4. Pemantapan Sistem Pendidikan Pertanian Tahun 2023

Pendidikan pertanian memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan pelaku pertanian tidak terkecuali petani muda. Dengan memberikan pengetahuan teknis, keterampilan manajemen, pemahaman inovasi dan teknologi pertanian, serta sikap berwirausaha, pendidikan pertanian menciptakan petani muda yang siap menghadapi tantangan pertanian modern. Kegiatan yang mendukung penguatan pendidikan pertanian yaitu:

- Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan Sasaran *output* Mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi vokasi pertanian D-IV Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan YOMA-Magelang, Polbangtan YOMA-Yogyakarta, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, Polbangtan Manokwari. Target mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi vokasi pertanian D-IV sebesar 4.410 Org.
- Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma III
 Sasaran *output* mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi vokasi pertanian D-III;
 Polbangtan Bogor, Polbangtan Gowa dan PEPI. Target Mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi vokasi pertanian D-III sebesar 850 Org
- Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian Sasaran *output* siswa yang mengikuti pendidikan menengah vokasi pertanian: SMK-PP Sembawa, SMK-PP Banjar Baru, dan SMK-PP Kupang. Target siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian sebesar 1.010 Org.
- Penyetaraan Penyuluh SMA ke Diploma IV (RPL)
 Sasaran output Mahasiswa yang mengikuti Penyelenggaraan Penyetaraan Penyuluh
 Pertanian PPPK SMA Ke Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan atau D-IV: Polbangtan Medan,
 Polbangtan Bogor, Polbangtan YOMA, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, Polbangtan
 Manokwari. Target mahasiswa yang mengikuti Penyelenggaraan Penyetaraan Penyuluh
 Pertanian PPPK SMA Ke Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan atau D-IV sebesar 1816 Orang.
- Kegiatan penunjang untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya pertanian terutama petani muda yaitu:
 - Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP)
 - ▼ Bantuan alat praktik siswa SMK-PP Binaan Kementerian Pertanian Tahun 2023
 - Frogram permagangan ke Taiwan dan specified skilled workers (SSW) Jepang bagi alumni
 - Polbangtan/ PEPI/Petani Muda Tahun 2023
 - Petani Milenial atau Total *Milenial Agriculture Forum* Tahun 2023



Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)
YESS Program adalah program pelayanan kewirausahaan dan dukungan ketenagakerjaan bagi kaum muda pedesaan untuk penumbuhan wirausaha atau pencari kerja di bidang pertanian.

Kegiatan YESS NPMU tahun 2023 dilaksanakan di 4 Propinsi dan 15 Kabupaten; Provinsi Jawa Barat (Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Subang). Jawa Timur (Malang, Pasuruan, Tulung Agung dan Pacitan), Sulawesi Selatan (Bantaeng, Bulukumba, Maros, dan Bone), dan Kalimantan Selatan (Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu).

Sasaran output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat adalah Terciptanya Kewirausahawan dan Ketenagakerjaan oleh Pemuda dan Pemudi Desa di Sektor Pertanian.

3.3. Implementasi Program Terobosan

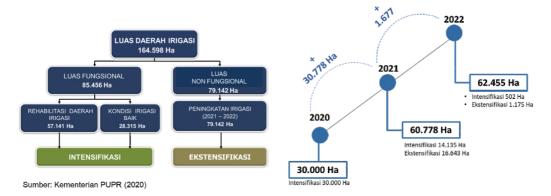
3.3.1. Pengembangan *Food Estate*

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan nasional dan pencegahan krisis pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, maka pengembangan kawasan *Food Estate* atau Kawasan sentra produksi pangan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan maksud tersebut. Sebagaimana amanat Presiden RI pada Rapat terbatas, yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Pengembangan kawasan *Food Estate* juga dilakukan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Pengembangan *Food Estate* telah mulai dirintis sejak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejak Tahun 2021, pengembangan *Food Estate* telah dilakukan di beberapa lokasi yaitu Kalimantan Tengah (Kab. Pulang Pisau dan Kab. Kapuas), Sumatera Utara (Kab. Humbang Hasundutan), Nusa Tenggara Timur (Kab. Sumba Tengah dan Belu).

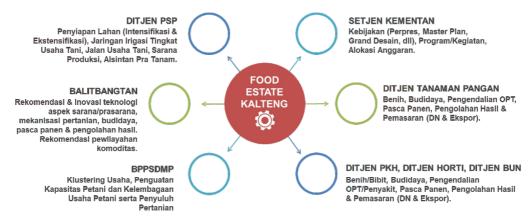
Selanjutnya dalam implementasinya, telah disusun Rencana Induk *Food Estate* (KSPP) yaitu Keputusan Menteri/Kepala Bappenas Kalimantan Tengah Nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Induk *Food Estate* Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri/Kepala Bappenas Kalimantan Tengah Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Induk *Food Estate* Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Sumatera Utara.

a. Kalimantan Tengah

Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengan dilakukan dengan pengembangan budidaya padi (on farm) khususnya di Kab. Kapuas dan Kab. Pulang Pisau yang dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan secara bertahap seluas 30.000 ha pada tahun 2020, 30.778 ha (2021), dan 1.677 ha (2022), atau total luasan 62.455 ha. Kegiatan Intensifikasi lahan yang dilakukan pada sawah eksisting masyarakat telah meningkatkan produktivitas dan produksi padi.



Gambar 51. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Food Estate tahun 2020-2022



Gambar 52. Pembagian tugas dan peran Eselon I dalam Pengembangan Food Estate Kalteng



Tabel 6. Luas tanam, panen, produksi dan produktivitas kegiatan ekstensifikasi TA 2021-2023

No.	Kabupaten	Luas Lahan Ekstensifikasi (Ha)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kapuas	13.944,90	4.868,39	3.158,43	2,14	6.763,12
2.	Pulang Pisau	3.874,44	2.110,60	817,44	1,55	1.269,17
	Total	17.819,34	6.978,99	3.975,87	2,02	8.032,29

Pada Tahun 2021, terjadi peningkatan nilai ekonomi sebesar Rp. 41,84 Milyar setelah adanya *Food Estate*, sebagai implikasi dari peningkatan produksi melalui indeks pertanaman dan/atau produktivitas pada lahan intensifikasi lahan sawah

Tabel 7. Dampak ekonomi pelaksanaan Food Estate TA 2020-2021

	Indikator	Tah		
No.		2020 Sebelum FE	2021 Setelah FE	Peningkatan
A.	Kabupaten Kapuas			
	1. Luas Tanam (ha)	12.780	13.000	220
	2. Luas Panen (ha)	12.338	13.000	662
	3. Produktivitas (ton/ha)	3,13	3,5	0
	4. Produksi (ton/GKG)	38.817	45.500	6.883
В.	Kabupaten Kapuas			
	1. Luas Tanam (ha)	12.780	13.000	220
	2. Luas Panen (ha)	12.338	13.000	662
	3. Produktivitas (ton/ha)	3,13	3,5	0
	4. Produksi (ton/GKG)	38.817	45.500	6.883
	Total Luas Tanam (ha)	13.915	14.135	220
	Total Produksi (ton/GKG)	41.741	49.347	7.606
	Nilai Penjualan (Rp Miliar)	119,62	271,46	41,84

Pada Tahun 2022, terjadi peningkatan nilai ekonomi sebesar **Rp. 3.32 Milyar** setelah adanya *Food Estate*, sebagai implikasi dari peningkatan produksi melalui indeks pertanaman dan/atau produktivitas.

Tabel 8. Dampak ekonomi pelaksanaan Food Estate TA 2022

	Indikator	Tah	Tahun			
No.		2020 Sebelum FE	2021 Setelah FE	Peningkatan		
A.	Kabupaten Kapuas					
	1. Luas Tanam (ha)	502	502	0		
	2. Luas Panen (ha)	451	451	0		
	3. Produktivitas (ton/ha)	2,5	3,2	0,70		
	4. Produksi (ton/GKG)	1.127,5	1.443	316		
	Total Luas Tanam (ha)	11.32971,5	14.435	220		
	Total Produksi (ton/GKG)	1412745	49.347	7.606		
	Nilai Penjualan (Rp Miliar)	1119,768	271446	41384		









Gambar 53. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi di lokasi Food Estate Kalimantan Tengah

Selain komoditas utama yaitu padi, juga dikembangkan komoditas lainnya untuk memanfaatkan lahan dan potensi di lingkungan sekitar, yaitu untuk komoditas subsektor hortikultura, perkebunan dan peternakan.



BUDIDAYA SAYURAN 238 HEKTAR

(TA 2020-2022)

Produksi Sayuran

Perkiraan nilai manfaat bantuan : 8,25 milyar

tomat., kangkong, kacang Panjang, seledri, bayam



BUDIDAYA TANAMAN BUAH

590 HEKTAR

(TA 2020-2022)

Potensi Produk Buah

Perkiraan nilai manfaat bantuan : 81,5 milyar

Ket: jeruk, durian, kelengkeng berbuah tahun ke 3-4. Pisang berbuah tahun berjalan

Gambar 54. Pengembangan komoditas hortikultura di lokasi Food Estate Kalimantan Tengah



Perkiraan nilai manfaat dari bantuan pengembangan komoditas buah sebesar Rp. 81.552.500.000 (perkiraan hasil panen sampai tahun 2027), sedangkan perkiraan nilai manfaat bantuan pengembangan komoditas sayuran sebesar Rp. 8.251.322.920.

Pengembangan komoditas perkebunan melalui bantuan bibit pohon kelapa genjah sebanyak 178.000 batang pohon yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021.



BUDIDAYA KELAPA GENJAH

178.000 POHON

Pulang Pisau: 58.000 batang Kapuas: 120.000 batang

Gambar 55. Pengembangan komoditas perkebunan di lokasi Food Estate Kalimantan Tengah

Pengembangan komoditas peternakan (itik) dilaksanakan pada tahun 2020 – 2022 melalui bantuan pengadaan ternak itik sebanyak 60.650 ekor, pakan sebanyak 341.000 kg dan kandang sebanyak 116 unit.



BUDIDAYA ITIK 60.650 EKOR

(T.A. 2020 - 2022)

Produksi Telur: 2.238.748 butir

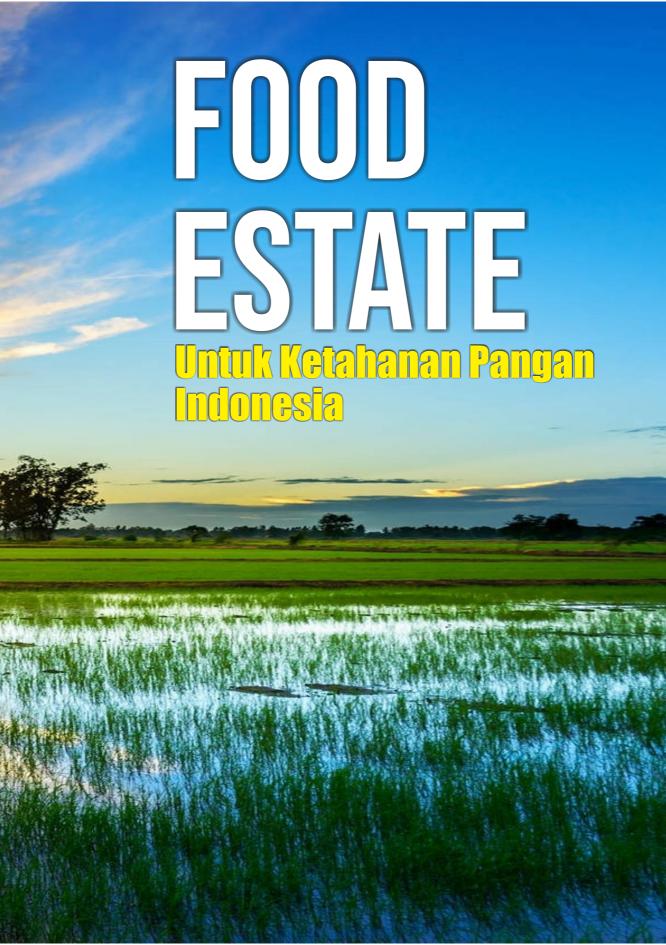
Perkiraan nilai manfaat bantuan : Rp 7.525.288.000

Gambar 56. Pengembangan komoditas peternakan di lokasi Food Estate Kalimantan Tengah

Setiap kelompok ternak menerima 500 ekor itik petelur; bantuan pakan; dan bantuan uang pembuatan kandang. Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi: 1) Penyiapan Calon Lokasi dan Calon Peternak; 2) Bimbingan Teknis Calon Peternak; 3) Pembangunan kandang itik; 4) Pengadaan ternak itik, bantuan pakan dan obat-obatan serta vitamin; 5) Pendampingan dan pembinaan.

Rata-rata produksi telur per kelompok di Kabupaten Pulpis Tahun 2022 sebanyak 330-700 butir per hari, sedangkan Rata-rata produksi telur per kelompok di Kabupaten Kapuas Tahun 2022 sebanyak 415-600 butir per hari. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah dihasilkan telur sebanyak 2.238.748 butir. Adapun perkiraan nilai manfaat dari bantuan pengembangan komoditas peternakan (itik) sebesar Rp. 7.525.288.000.







(2 894 Ha)

(1.673 Ha)

(3.228 Ha)

Pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam pembentukan korporasi petani dari tahun 2020 s.d 2022

Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3 KEP dari 6 kecamatan

- Sepakat Khapas Mandiri (Kecamatan Khahayan Kuala, Pandih Batu, Sebangau Kuala)
- Jaya Sejahtera Mandiri (Kecamatan Pandih Batu)
- Cahaya Kahayan Modern (Kecamatan Maliku, Kahayan Hilir)

Kabupaten Kapuas sebanyak 5 KEP dari 11 kecamatan

- Bataguh Makmur (Kecamatan Bataguh)
- Tamban Kuala Bersatu (Kecamatan Tamban Catur, Kapuas Kuala)
- Makmur Bersama (Kecamatan Kapuas Timur, Pulau Petak)
- Sanggau Lau (Kecamatan Basarang, Kapuas Barat, Selat)
- Sepakat Maju Bersama (Kecamatan Kapuas Murung, Dadahup)

Sumatera Utara



- Lahan APL Pemerintah Kabupaten : 3.936 Ha Hutan Sosial, SK MenLHK 448/ 2020 : 1.868 Ha Pelepasan HPK FE, SK 448/ 2020 : 5.955 Ha
 - Gambar 57. Masterplan Food Estate Sumatera Utara

Pengembangan infrastruktur di Kab. Humbanghasundutan

Jaringan Jalan:

- Sampai 2022 telah dibangun Jalan Menuju Kawasan (8,6 KM)
- Pembangunan Jalan Menuju Kawasan FE sepanjang 15,5 KM senilai Rp 95.8 M
- Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 3 Km (2023) dan 48.5 KM (DAK 2024)

Jaringan Irigasi:

- Sampai 2022 telah Jar. Primer (8 reservoir & pipa induk)
- Penyelesaian jaringan sekunder *FE* 1000 ha.



Pengembangan infrastruktur di Kab. Pakpak barat

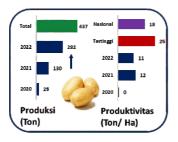
Target pengembangan FE Pakpak Barat sampai 2023 seluas 50 ha dan 200 ha pada 2024.

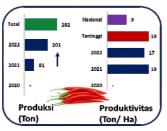
- Sudah dilakukan budidaya tanaman jagung seluas 25 ha (5 ha sudah panen & 20 ha penanaman) dan 25 Ha dalam Proses Pembersihan Lahan.
- Penyusunan SID/DED pengembangan FE 1.000 ha (Kemtan).
- Kementerian PUPR sedang menyusun DED Jalan dan Irigasi. Rencana Konstuksi tahun 2024 dengan target: Jalan menuju kawasan (4,8 KM), Jalan dalam kawasan (4,7 KM) serta
- Jaringan irigasi untuk 200 Ha.
- Dukungan Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 1.5 km (2023) dan 14.8 Km (DAK 2024).

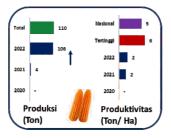
Dukungan Alsintan

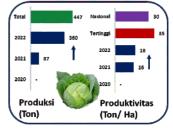
- Pengadaan Traktor Roda 4 Ukuran 45 Hp (10 unit)
- Pengadaan Cultivator Cakar Baja (10 unit)
- Kendaraan R3 (20 unit)
- Pompa Air 3 Inch Berbahan Bakar Solar (10 unit)
- Pengadaan Hand Sprayer (25 unit)
- Pengadaan Alat Pemipil Jagung/Corn Sheller Berkelobot (4 unit)
- Pengadaan alat tanam jagung ukuran 7-8 lubang (proses verifikasi)
- Alat Panen Jagung FCH 177 (proses verifikasi)
- Pengadaan Pengering Jagung *Dome* Ukuran 8 m x 20 m (proses verifikasi)

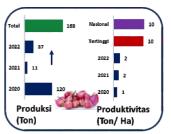
Capaian produksi dan produktifitas komoditas yang dikembangkan di lokasi *Food Estate* Sumatera Utara:







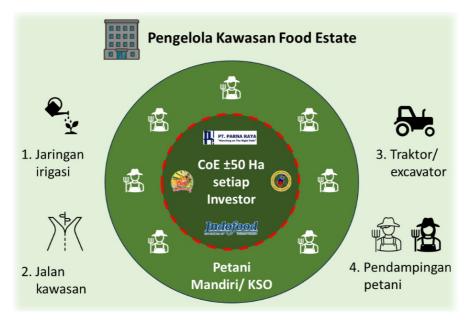




Gambar 58. Capaian Produksi dan Produktifitas Food Estate Sumatera Utara



Simpul *Center of Excellence (CoE)* Menjadi *Trigger* Pengembangan KSPP di Beberapa Titik Strategis Pengembangan *Food Estate*.



Gambar 59. Simpul Center of Excellence (CoE) Menjadi Trigger Pengembangan KSPP

Kerja sama pemanfaatan lahan:

- ▼ Center of excellence ±5 tahun, pelatihan & seleksi petani mitra
- ▼ Kerja sama operasional (KSO), investasi swasta di lahan petani
- Petani mandiri, 100% modal sendiri

Layanan Kawasan Food Estate:

- ▼ Pengelolaan jalan dan irigasi
- ✓ Alsintan (excavator dan traktor);
- ▼ Pendampingan petani untuk kemitraan, perizinan, dan sertifikasi lahan.



Gambar 60. Lokasi Food Estate Sumatera Utara Blok A



Gambar 61. Kerjasama Petani dengan PT Parna Raya, 50 Ha untuk Jagung di Pakpak Bharat



Sumba Tengah

Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten yang telah ditetapkan pada Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020 sebagai Lokasi *Food Estate*. Sasaran kegiatan adalah (1) memberi nilai tambah perekonomian petani; (2) meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman; (3) diversifikasi komoditas; (4) aspek hilirisasi dalam pemenuhan pakan ternak; dan (5) perubahan perilaku petani dalam pengembangan budidaya tanaman pangan (aspek sosial).

Pengembangan *Food Estate* di Kab. Sumba Tengah hingga saat ini telah memberikan manfaat sebagai berikut:

- ▼ Terjadi perluasan wilayah pengembangan *Food Estate*. Tahun 2020: 5.000 ha tersebar di 3 kecamatan 11 desa, 2021: 10.000 ha tersebar di 5 kecamatan 33 desa, dan 2022: 14.070 ha tersebar di 6 kecamatan 65 desa.
- ▼ Total anggaran yang telah dialokasikan ke *FE* Sumba Tengah 2020-2023 sebesar Rp 105 Miliar, KUR sebesar Rp 16,6 Miliar dan swadaya.
- ▼ Modernisasi Alsintan (pra dan pasca panen). Tersedia TR4: 10 unit, TR-2: 120 unit, cultivator 10 unit, pompa air 20 unit, combine harvester multiguna 17 unit, combine harvester besar 5 unit, power thresher 10 unit, corn sheller 15 unit, cornsheller mobile 2 unit, Vertical dryer 1 unit, dan RMU1 unit.
- ▶ Bertambahnya infrastruktur yang mendukung pertanian (sumur, embung, saluran irigasi dan jalan usaha tani). Terdapat sumur suntik panel surya 10 unit, rehab sumur bor panel surya 10 unit, dan rehab sumur bor engine 3 unit
- Meningkatkan luas tanam padi 2020-2022: 14.250 ha, panen: 14.018 ha, produksi 66.694 ton GKG senilai Rp 335,70 Miliar.
- Meningkatkan luas tanam jagung 2020-2022: 14.550 ha, panen: 14.047 ha, produksi 67.829 ton pipilan kering senilai Rp 353,46 Miliar.

- Peningkatan pendapatan rumah tangga petani (Rp689,16 Miliar) dan pendapatan jasa sewa alsintan (Rp3,22 Miliar).
- Angka kemiskinan Sumba Tengah menurun signifikan dari 34,62% (Tahun 2019) menjadi 32,51% (2022)
- ▼ Tanam jeruk 1.600 batang, mangga 1.500 batang, Kelapa Genjah 11.000 batang, dan itik 24.875 ekor.
- Perkembangan kelembagaan petani, semula belum terbentuk Gapoktan Bersama, saat ini sudah terbentuk 5 Gapoktan Bersama di 5 Zona di 5 kecamatan.

Pengembangan *Food Estate* di Kab. Sumba Tengah dilakukan di 6 kecamatan dan tersebar pada 40 desa. Tahun 2023 alokasi anggaran untuk pengembangan *Food Estate* sebesar Rp10.856.240.000,-.



Gambar 62. Lokasi Pengembangan Food Estate Kab. Sumba Tengah

Tabel 9. Daftar bantuan Food Estate Sumba Tengah

No.	Jenis Bantuan	Volume	Satuan
1.	Saprodi Jagung	4.000	На
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	2	Paket
3.	Pelatihan dari BBPP Kupang	60	Paket
4.	BOP (Penyuluh PNS, P3K, THL-RB PP)	74	Paket





Gambar 63. Kegiatan Pengembangan Food Estate di Kab. Sumba Tengah

■ Belu

Food Estate Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 2021. Dukungan anggaran FE Belu 2021-2022 sekitar Rp9,2 Miliar. Hasil investasi tersebut telah menghasilkan pendapatan sebesar Rp18,98 Miliar. Pengembangan Food Estate di Kab. Belu diantaranya telah menghasilkan sebagai berikut:

- ▼ Dibangunnya bendungan Rotiklot sebagai salah satu sarana pengairan
- Perluasan luas tanam dan produksi padi & jagung. Luas tanam padi 815 ha & produksi 3.207 ton GKP, dan luas tanam jagung 271 ha & produksi 795 ton
- Sebelumnya merupakan kawasan belum tersentuh usahatani, sekarang sudah ditanami 1-2 kali setahun
- Meningkatnya mekanisasi pertanian, yaitu telah dialokasikannya corn sheller 10 unit, power thresher 9 unit, TR-4: 6 unit, TR-2: 30 unit, pompa air 20 unit, cultivator 5 unit, dan alat tanam jagung 100 unit
- Peningkatan pendapatan petani dan kualitas SOM petani meningkat dari pelatihan yang dilakukan oleh BPSDMP

Tabel 10. Target, Luas tanam, Luas Panen dan Produksi di lokasi FE Kab. Belu

No.	Komoditas	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Padi	404	395	1.775
2.	Jagung	148	141	426



Tabel 11. Kendala dan Permasalahan Pengembangan Food Estate di Kab. Belu

No.	Aspek	Kendala/Permasalahan	Satuan
1.	Geospasial	a. Lahan berpasir dan berbatu b. Belum ada irigasi primer s.d. tersier c. Kecukupan dan distribusi air d. Rawan banjir dan kekeringan pada kawasan jagung	 a. Koordinasi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian terkait kesesuai lahan dengan komoditas pertanian. b. Koordinasi dengan PUPR terkait perlunya jaringan irigasi primer dan sekunder di lokasi FE c. Pembuatan bak penampung pada jalur irigasi primer s.d. Tersier d. Pembuatan box pembagi air, pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa e. Pembangunan embung dan irigasi air (jika masih diperlukan)
2.	On Farm	 a. Belum ada alokasi benih dari pusat untuk kebutuhan MT 2023/2024 b. Terdapat lahan seluas 10 ha pada lokasi FE yang belum siap dilakukan pertanaman c. Penggunaan Sprinkler belum Optimal d. Area layanan pendampingan penyuluh di lokasi FE terlalu luas e. Minimnya jumlah tenaga kerja pertanian f. Minimnya pengetahuan petani terkait budidaya pertanian 	a. Memasukkan kebutuhan benih FE Belu pada rancangan pusat, mempercepat CPCL dan diusulkan dalam eproporsal b. Koordinasi lebih lanjut dengan PUPR dan BWS Provinsi NTT terkait normalisasi lahan c. Pembuatan bak penampung, box pembagi, pembangunan rumah pompa dan pengadaaan poma d. Mengoptimalkan peran mahasiswa/alumni Polbangtan dan SMKPP, serta penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan terhadap poktan di lokasi FE e. Mengadakan bimtek dan pelatihan budidaya pertanian untuk petani
3.	Off Farm	a. Kekurangan modal usaha tani b. Spesifikasi <i>RMU</i> tidak sesuai kapasitas produksi padi c. Hasil penggilingan gabah banyak pecah (karena ada sparepart rusak	a. Memasukkan kebutuhan alsintan pascapanen dan rumah pengendali hama yang dibutuhkan pada rancangan pusat b. Mengoptimalkan peran Mahasiswa/Alumni Polbangtan dan SMKPP, serta penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan terhadap poktan di lokasi FE c. Mengadakan bimtek dan pelatihan agribisnis untuk petani

3.3.2. Korporasi Petani

Sesuai amanat RPJMN 2020-2024, dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Salah satu *major project* yang diamanatkan kepada Kementerian Pertanian yaitu penguatan jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan (KPN). Inisiasi *major project* KPN ini diharapkan dapat 1) meningkatkan pendapatan petani-rata-rata 5% per tahun sebagaimana target *SDGs*; 2) mampu meningkatkan produktivitas komoditas 5% per tahun; dan 3) terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam penglolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah (APBN dan Subsidi) menjadi mandiri (investasi dan bisnis).

Pelaksanaan *Major project* KPN diharapkan dapat didanai oleh berbagai sumber pembiayaan yaitu APBN, swasta, BUMN, swadaya. Oleh sebab itu, pelaksana kegiatan KPN sektor pertanian diharapkan dapat melibatkan Kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Swasta, Perguruan Tinggi, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah serta Kementerian yang memiliki kewenangan terkait regulasi seperti, Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.



Gambar 64. Dasar hukum Major Project Penguatan Jaminan serta 350 korporasi petani dan nelayan







Tabel 12. Kelembagaan Korporasi Petani Kementan 2020-2024

No.	Korporasi Sub Sektor	Koperasi						lumlah
		Koperasi	PT	Poktan	CV	LKLMA	UMKK	Jumlah
1.	Tanaman Pangan	21	8	18	1	-	-	48
2.	Hortikultura	20	4	-	1	3	-	28
3.	Perkebunan	-	1	-	-	-	-	1
4.	Peternakan	16	2	-	-	-	-	18
	Jumlah	57	15	18	2	3	-	95

Untuk mendukung pengembangan korporasi petani, Kementerian Pertanian melakukan intervensi melalui berbagai kegiatan yang dapat mendukung proses pengembangan korporasi petani.



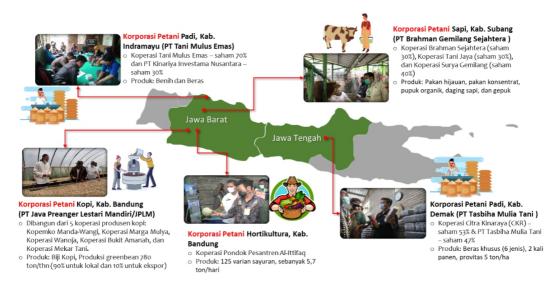
Gambar 65. Intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian



Gambar 66. Dukungan Penyuluhan Pertanian



Pengembangan korporasi petani yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian hingga tahun 2023 telah mencapai 78 korporasi petani dengan berbagai bentuk usaha yang tersebar di empat subsektor pertanian. Pad tahun 2020 dikembangkan 5 *pilot project* korporasi petani yang diharapkan dapat menjadi contoh untuk pembentukan korporasi petani di lokasi lainnya. Lima korporasi petani percontohan telah memiliki badan hukum yang jelas, memiliki bisnis pertanian yang telah berjalan namun masih perlu pengembangan usaha sehingga memerlukan dukungan terutama pada aspek pemasaran, pembiayaan dan teknologi.



Gambar 67. Lima Percontohan Korporasi Petani

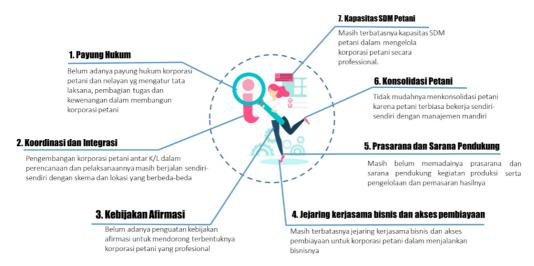
Tabel 13. Korporasi Petani Kementan yang telah dibentuk tahun 2020-2023

No.	Korporasi Sub Sektor	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1.	Tanaman Pangan	2	5	11	13	31
2.	Hortikultura	1	6	14	7	28
3.	Perkebunan	1	-	-	-	1
4.	Peternakan	8	1	1	-	18
	Jumlah	12	26	26	20	78

Bentuk kelembagaan dari 78 korporasi petani pada empat subsektor, beragam yang terdiri dari bentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), CV, Kelompok Tani, LKMA, maupun UMKK.



Dalam mengembangkan korporasi petani, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang perlu dilakukan koordinasi *stakeholder* terkait. Kendala yang menjadi potensi kegagalan terbentuknya korporasi petani dapat bersumber dari aspek regulasi, sumberdaya, pemasaran, pembiayaan dan koordinasi.



Gambar 68. Kendala Pengembangan Korporasi Petani

3.3.3. Gernas El Nino

Dampak adanya perubahan iklim (*El Nino* dan *La Nina*) telah menjadi ancaman paling nyata terhadap upaya mewujudkan pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Siklus kejadian yang semakin pendek dan intensitas yang semakin meningkat, mengkondisikan semua negara (termasuk Indonesia) untuk senantiasa bersiap dan mengembangkan teknologi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. *El Nino* yang terjadi pada tahun 2023 mendapat perhatian khusus, di saat dunia masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi *Covid-19*, menyebabkan potensi penurunan produksi pertanian dan lonjakan harga pangan harus diantisipasi secara cepat, cermat dan tepat guna menghindari potensi gejolak ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.

Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai program dan kegiatan untuk melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) percepatan dan perluasan tanam peningkatan produksi padi dan jagung sebagai upaya mengadapi krisis pangan dan *El Nino*. Rangkaian kegiatan UPSUS tersebut mencakup peningkatan IP dan areal tanam padi dan jagung, optimasi lahan rawa, mekanisasi dan perbaikan sistem pengairan serta penguatan kelembagaan, penyuluhan dan SDM pertanian.

Gernas *El Nino* diharapkan mampu mengkompensasi penurunan produksi padi sebanyak 3 juta ton GKG atau 1,5 juta ton beras. Rencana aksi kegiatan Gernas *El Nino* 2023 yang dilakukan adalah:

- Gerakan kejar tanam (Gertam) 1.000 ha/kab dan Gernas *El Nino* 500.000 ha di 10 provinsi, meningkatkan IP, Perluasan Areal Tanam dan provitas, berdasarkan mapping wilayah padi;
- Perluasan Areal Tanam (PAT) 100.000 ha padi bagi kabupaten potensial ditanam saat musim kering dengan saprodi, pompa dan sumur sebagai kompensasi terkena dan puso iklim ekstrim, witayah pasang surut, rawa lebak, lahan kosong/nganggur dan lainnya.

- Gerakan kejar tanam (Gertam) 1.000 ha/kab dan Gernas *El Nino* 500.000 ha di 10 provinsi, meningkatkan IP, Perluasan Areal Tanam dan provitas, berdasarkan *mapping* wilayah padi;
- Perluasan Areal Tanam (PAT) 100.000 ha padi bagi kabupaten potensial ditanam saat musim kering dengan saprodi, pompa dan sumur sebagai kompensasi terkena dan puso iklim ekstrim, wilayah pasang surut, rawa lebak, lahan kosong/nganggur dan lainnya.
- Pertanian presisi: skala ekonomi, *polygon dashboard* TIK, saprodi tepat, alsin hulu-hilir, penggunaan drone, pertanian ramah lingkungan, efisiensi biaya input melalui pemanfaatan pupuk organik, hayati, pestisida nabati, elisitor biosaka, *Plant Growth Promoting Rhizobacter (PGPR)* dan lainnya.
- Budidaya padi hemat air, lahan macak-macak
- Gunakan benih tahan kekeringan dan OPT:
 - Padi sawah irigasi: Inpari 13, 19, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 46, cakrabuana, padjadjaran, siliwangi, cisaat, M70D dll
 - Padi lahan non irigasi, lahan kering, tadah hujan: padi gogo, Inpago 4-13, Silugonggo, Batutegi, Towuti, Limboto, Situpatenggang, Situbagendit, IPB 9G, Rindang 1 Agritan, Rindang 2 Agritan, luhur 1, luhur 2, Bio patenggang Agritan, Bio Bestari Agritan dll
- Bagi lokasi terdampak, *delay* dan mengkompensasi tanam di daerah lain. Bagi lokasi sulit air, bertanam pangan lokal.
- Hilirisasi pangan, Kostraling naik kelas, gudang buffer stok pangan
- Kolaborasi, Gugus tugas, Brigade: antisipasi, adaptasi, mitigasi
- Early warning system, pantau BMKG, money dan pelaporan
- Agenda: Antisipasi Dini, Adaptasi, Mitigasi dan Kolaborasi El Nino.



Gambar 69. Peta sebaran kegiatan *el nino* sektor pertanian





Realisasi tanam Gernas *El Nino* sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai 685.972 hektar atau 116 persen dari target akhir seluas 587.130 ha atau 137,19 persen dari target awal 500.000 hektar. Realisasi tanam Gernas *El Nino* per Provinsi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Kegiatan Gernas El Nino di 10 Provinsi di Inonesia Tahun 2023

No.	Provinsi	Target (ha)	Realisasi Tanam s.d. 31 Des 2023 (ha)	%
1.	Sumatera Utara	42.405	40.180	94,8
2.	Sumatera Selatan	103.672	192.897	186,1
3.	Lampung	40.383	34.430	85,3
4.	Jawa Barat	70.285	61.875	88,0
5.	Jawa Tengah	60.000	60.000	100,0
6.	Jawa Timur	61.689	61.689	100,0
7.	Kalimantan Selatan	62.880	63.936	101,7
8.	Sulawesi Selatan	80.619	82.243	102,0
9.	NTB	13.403	13.403	100,0
10.	Banten	51.794	75.319	145,4
	Jumlah	587.130	685.972	116,8



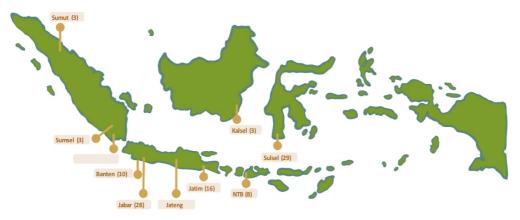
Dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk penangaan dampak *el nino* tahun 2023 berupa 132 unit sarana dan prasarana dengan anggaran sebesar Rp14,65 miliar. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berupa infrastruktur irigasi pertanian dan pompa air. Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 30 unit di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota dan Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 14 unit di 7 provinsi dan 13 kabupaten/kota.

Tabel 15. Alokasi Kegiatan Irigasi Pertanian Penanganan Dampak El Nino TA 2023

No.	Kegiatan	PAGU		REALISASI			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Unit	Rp	Unit	%	Unit	%
1.	Banten	10	1.150.000.000	10	100,00	1.150.000.000	100,00
2.	Jawa Barat	28	2.800.000.000	28	100,00	2.665.000.000	95,18
3.	Jawa Tengah	18	1.950.000.000	18	100,00	1.950.000.000	100,00
4.	Jawa Timur	16	1.800.000.000	16	100,00	1.800.000.000	100,00
5.	Kalimantan Selatan	3	450.000.000	3	100,00	450.000.000	100,00
6.	Lampung	14	1.250.000.000	14	100,00	1.250.000.000	100,00
7.	Nusa Tenggara Barat	8	900.000.000	8	100,00	900.000.000	100,00
8.	Sulawesi Selatan	29	3.200.000.000	29	100,00	3.200.000.000	100,00
9.	Sumatera Selatan	3	400.000.000	3	100,00	400.000.000	100,00
10.	Sumatera Utara	3	300.000.000	3	100,00	300.000.000	100,00
Total		132	14.200.000.000	132	100,00	14.065.000.000	95,05

Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim

Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas) sebanyak 88 unit di 9 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas) ini terdiri dari irigasi perpompaan 41 unit, irigasi perpipaan 11 unit, Embung/Damparit/*Long storage* 23 unit, dan irigasi air tanah 13 unit.



Gambar 70. Realisasi Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino TA 2023





Gambar 71. Kegiatan irigasi pertanian mendukung penanganan dampak El Nino

Pompa Air

Pompa air dapat membantu petani untuk memindahkan air dengan lebih mudah dan cepat. Keberadaannya juga membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan air ke seluruh tanaman. Pompa Air untuk mendukung kegiatan Gerakan Nasional *El Nino* tahun 2023 dialokasikan di 10 Provinsi sebanyak 135 unit.



Gambar 72. Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air (Gernas El Nino) TA 2023

3.4. SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

3.4.1. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Dalam rangka mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian dan mengamankan produksi nasional, maka kementerian Pertanian memperkuat infrastruktur dan alat mesin pertanian. Pada Tahun 2023 alat dan mesin pertanian yang disalurkan mencapai 23.081 unit dengan rincian seperti gambar berikut ini.



	TRAKTOR RODA 4	TRAKTOR RODA 2	POMPA AIR	POMPA AIR (GERNAS)
Target (unit)	1.076	5.504	2.753	135
Realisasi (unit)	1.076	5.504	2.753	135
Jumlah Kontrak	44	45	22	2
Jumlah Penyedia	8	2	5	2
Jumlah Merk/Tipe	9	9	7	2
	HAND SPRAYER	KENDARAAN RODA 3	CULTIVATOR	
Target (unit)	10.226	572	2.775	
Realisasi (unit)	10.226	572	2.775	
Jumlah Kontrak	15	10	16	
Jumlah Penyedia	4	2	3	

Gambar 73. Realisasi Fisik Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2023



Traktor merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan usaha tani. Boleh dikatakan bahwa traktor merupakan mesin utama untuk menggerakan sejumlah alat dan mesin pertanian, seperti alat pengolah tanah (bajak, garu, rotari), alat penanam, khususnya penanam biji-bijian (seeder), alat pengangkut hasil pertanian, pompa air irigasi, dan sebagainya. Traktor roda empat merupakan salah satu jenis traktor andalan untuk mekanisasi pertanian terutama pada lahan yang cukup luas.

Traktor roda 4 sangat cocok digunakan dilahan sawah dengan skala luas dan datar. Cocok juga digunakan untuk tanah yang kering atau tadah hujan sehingga untuk percepatan tanaman padi, jagung dan kedelai (pajale). Demikian juga sangat baik digunakan untuk daerah-daerah yang minim tenaga kerja.

Target Traktor Roda 4 tahun 2023 sebanyak 1.076 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 379.989.400.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 28 Provinsi dan 206 Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 1.076 unit (100%) dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 379.955.483.112 (99,99%).





Gambar 74. Peta penyaluran bantuan traktor roda-4 Kementerian Pertanian TA 2023

b. Traktor Roda-2

Traktor merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan usaha tani. Boleh dikatakan bahwa traktor merupakan mesin utama untuk menggerakan sejumlah alat dan mesin pertanian, seperti alat pengolah tanah (bajak, garu, rotari), alat penanam, khususnya penanam biji-bijian (seeder), alat pengangkut hasil pertanian, pompa air irigasi, dan sebagainya.

Traktor roda dua merupakan tenaga penggerak untuk sejumlah alat dan mesin pertanian seperti bajak, garu, dan glebek. Traktor jenis ini banyak diminati oleh petani terutama untuk lahan-lahan yang relatif kecil ukurannya karena biaya operasinya yang murah. Traktor roda dua (*two wheel drive tractor*) atau traktor tangan (hand tractor) adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan pekerjaan pertanian lainnya yang mempunyai efisiensi yang tinggi, karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan.

Target Traktor Roda 2 tahun 2023 sebanyak 5.504 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 168.895.744.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 29 Provinsi dan 206 Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 5.504 unit (100%) dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 168.676.132.613 (99,87%).





Gambar 75. Pemanfaatan Traktor Roda 2



Pompa air adalah alat yang digunakan di berbagai industri untuk meningkatkan tekanan air sehingga dapat memindahkannya dari lokasi ke lokasi lain. Pompa air modern sedang digunakan di seluruh dunia untuk menyediakan air yang aman untuk keperluan perumahan, komersial, dan industri.

Pompa air termasuk salah satu alat yang menjadi sahabat bagi para petani. Pompa air membantu petani untuk memindahkan air dengan lebih mudah dan cepat. Keberadaannya juga membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan air ke seluruh tanaman.

Target Pompa Air tahun 2023 sebanyak 2.753 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.57.964.415.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 27 Provinsi dan 203 Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebanyak 2.753 unit (100%) dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 57.809.792.000 (99,73%).





Gambar 76. Pemanfaatan Pompa Air

3.4.2. Pengembangan Embung Pertanian

Embung pertanian dibangun dengan model embung *geomembran*. *Geomembran* untuk embung adalah bangunan penampung air yang dibuat di atas tanah dengan cekungan seperti danau atau kolam. Pada cekungan, material geomembran melapisi bangunan untuk menjadi lapisan yang bersifat kedap. Pelapis kedap ini bertujuan untuk mengganti material beton pada bangunan permanen. Pembangunan embung geomembran memiliki keuntungan yaitu:

- Tidak memerlukan material seperti pasir, semen, konstruksi besi, dan batu. Pengerjaan cepat dan mudah.
- Material HDPE (High Density Polyethylene) bersifat kuat, tahan terhadap kelembaban ekstrem dan bahan-bahan kimia, serta fleksibel.
- Pembangunan embung dengan geomembran bersifat praktis dan lebih ekonomis.

Lokasi embung ditempatkan dekat dengan lahan usaha tani, diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani. Lokasi tempat pengembangan embung status kepemilikannya harus jelas (tidak dalam sengketa). Lokasi tempat pengembangan dilengkapi surat pernyataan tidak ada ganti rugi lahan oleh kelompok penerima manfaat dan sebaiknya dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang.

Target Embung Pertanian tahun 2023 sebanyak 503 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.860.000.000. Kegiatan tersebut dialokasikan di 17 Provinsi dan 84 Kabupaten dengan realisasi fisik sebanyak 503 unit (100%) dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 47.629.350.400 (99,52%).





Gambar 77. Pembangunan embung sektor pertanian TA 2023

3.4.3. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.58.300.623.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 57.704.994.625 (98,98%). Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim memiliki target 459 unit yang terdiri atas 172 unit kegiatan infrastruktur irigasi pertanian dan 160 unit kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan. Sampai dengan akhir Desember 2023, kegiatan ini tercapai 151 unit (87,79%) kegiatan infrastruktur irigasi pertanian dan 160 unit (100%) kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan. Kegiatan infrastruktur irigasi pertanian sejumlah 151 unit terdiri atas berbagai jenis kegiatan yaitu sebagai berikut.



Gambar 78. Realisasi fisik kegiatan Infrastruktur irigasi pertanian TA 2023



3.4.4. Unit Pengolah Pupuk Organik

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara in situ.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut.

- Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik
- Tersedianya pupuk organik insitu produksi UPPO
- Berkembangnya penggunaan pupuk organik dan berkurangnya penggunaan pupuk kimia
- Meningkatkan kesuburan lahan karena penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan dan berkurangnya pemakaian pupuk kimia
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan pendapatan petani serta pemberdayaan kelompok.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dialokasikan sebesar Rp. 222.200.000.000 untuk 1.111 unit di 27 provinsi dan dengan anggaran per unit nya sebesar Rp. 200.000.000. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 sebanyak 1.109 unit (99,82%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 221.800.000.000 (99,82%).



Gambar 79. Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2023

3.4.5. Pembiayaan Sektor Pertanian

Pembiayaan pertanian memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Melalui program pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses, petani dapat memperoleh modal untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. Dengan bantuan pembiayaan, petani dapat membeli benih berkualitas, pupuk, dan peralatan modern yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, pembiayaan juga membantu mengurangi risiko keuangan yang dihadapi petani akibat fluktuasi harga komoditas atau bencana alam. Dengan pemanfaatan yang tepat, pembiayaan pertanian dapat menjadi salah satu pendorong utama untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pembiayaan sektor pertanian dapat berupa berbagai bentuk, diantaranya adalah asuransi pertanian dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Asuransi pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan petani Indonesia terhadap risiko kerugian akibat bencana alam atau faktor eksternal lainnya. Di Indonesia, program asuransi pertanian telah dikembangkan untuk membantu melindungi petani dari kerugian finansial yang dapat timbul akibat gagal panen akibat cuaca buruk, serangan hama, atau penyakit tanaman. Program ini bekerja dengan prinsip pembagian risiko antara petani, perusahaan asuransi, dan pemerintah.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Dalam UU No 19 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 37 dijelaskan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah Berkewajiban Melindungi Usahatani dalam Bentuk Asuransi Untuk Melindungi Dari Kerugian Gagal Panen". Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 40 Th 2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, Pemerintah memfasilitasi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak. Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Penggangu Tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani. Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah saat ini memberikan solusi terbaik berupa program Asuransi Usaha Tani Padi yang disingkat dengan AUTP, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi.

Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya. Diselenggarakannya AUTP tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan oraganisme pengganggu tumbuhan. Mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT melalui pihak lain yakni pertanggungan asuransi. Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen. Resiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak. Sedangkan penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa.



Serangan hama dan penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan gagal panen sehingga petani akan mengalami kerugian. Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Premi Asuransi Usaha Tani Padi saat ini 3%. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar enam juta rupiah per hektar per musim tanam, yaitu sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam, dan saat ini petani harus membayar premi swadaya 20% proporsional, sebesar 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional sesuai luas area yang diasuransikan.

Bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya, bukti pembayaran premi swadaya untuk disampaikan ke dinas pertanian kabupaten atau kota yang menjadi dasar keputusan penetapan peserta asuransi definitif.



Gambar 80. Realisasi klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) (ha) Tahun 2019-2023

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Asuransi tersebut telah diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. AUTSK bertujuan untuk mengalihkan resiko kerugian usaha, akibat sapi atau kerbau yang mengalami kematian dan/atau kehilangankepada pihak lain, dalam hal ini adalah Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO) melalui pertanggungan asuransi, dengan sasaran terlindunginya peternak dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2020, program AUTSK dilaksanakan dalam koordinasi Komando strategi Pertanian (Kostra Tani), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Resiko yang dijamin berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tersebut adalah:

- ▼ Sapi atau kerbau yang mati karena beranak;
- Sapi atau kerbau yang mati karena penyakit hewan menular yang telah ditetapkan yaitu anthrax, brucellosis, septicaemia epizootica, infectious bovine rhinotracheitis, bovine tuberculosis, paratuberculosisi, campilobacteriosis, penyakit jembrana, surra, cysticercosisi, penyakit mulut dan kuku, Qfever, bovfine ephemeral fever dan bovine viral diarrhea;
- ▼ Sapi atau kerbau yang mati karena kecelakaan;
- ▼ Sapi atau kerbau yang hilang karena pencurian.





Gambar 81. Realisasi klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (ekor) Tahun 2019-2023

Perkembangan dari tahun 2019-2023 jumlah ternak sapi/kerbau yang diikutsertakan dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan minat petani/peternak dalam mengasuransikan pertanian atau ternaknya semakin berurang. Asuransi masih belum diprioritaskan oleh petani yang selama ini belum melihat manfaatnya secara langsung. Selain itu prosedur verifikasi usulan dan klaim kerugian masih menyulitkan petani

b. Kredit Usaha Tani (KUR)

Sektor pertanian mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam ekosistem dari hulu ke hilir di dalam ikatan rantai nilai, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan ekspor. Ruang pasar ekspor hasil pertanian sangat besar untuk dioptimalkan. Ke depan, Kementerian Pertanian dan seluruh pemangku kepentingan memberi dukungan kepada UMKM sektor pertanian dengan mengakselerasi perkembangan ekosistem digital mulai dari pembiayaan, pendampingan, pembinaan, hingga penjualan, agar pelaku UMKM tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbatas tentunya tidak dapat memenuhi harapan semua petani di seluruh daerah. Oleh karena itu diperlukan sumber pembiayaan yang berpihak pada sektor pertanian melalui pendanaan oleh Lembaga keuangan/perbankan. Dalam rangka untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha sektor pertanian, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, diperlukan kredit usaha rakyat sektor pertanian.

Uraian	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR Khusus	KUR TKI
Suku Bunga	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun
Subsidi Bunga	10.5%	5.5%	5.5%	14%
Plafon	Rp 0 — Rp50 juta per Penerima KUR	Diatas Rp50 juta – Rp500 juta per Penerima KUR	Rp 0 – Rp500 juta per Penerima KUR	Rp 0 – Rp25 juta per Penerima KUR
Total akumulasi plafon	 Sektor produksi: tidak dibatasi Sektor non produksi (perdagangan): Rp200 juta per Penerima KUR 	Rp500 juta per Penerima KUR	Rp500 juta per Penerima KUR	Rp25 juta per Penerima KUR
Agunan pokok	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR
Agunan tambahan	tidak diwajibkan dan tanpa perikatan	sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR	sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR	tidak diwajibkan dan tanpa perikatan



Gambar 82. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Ini merupakan upaya Pemerintah yang seimbang antara penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional. KUR saat ini bunganya disubsidi 3% sampai akhir tahun ini. Perbankan diharapkan dapat lebih mendorong usaha kecil, menengah dan mikro. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM harus naik menjadi 30% tahun 2024, yang artinya dari total kredit, 30% adalah UMKM. Upaya keras Pemerintah melalui program KUR dan berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan tren perbaikan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2021 sebesar 7,07% (yoy). Selama masa pandemi, Pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6% pada tahun 2020 dan 3% pada tahun 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR serta relaksasi persyaratan administrasi

Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian atau KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sektor pertanian masih menghadapi beberapa masalah diantaranya keterbatasan permodalan. Mayoritas petani memiliki lahan sempit, tidak mampu menigkatkan luasan lahan menggunakan modal sendiri. Modal merupakan bagian input usaha tani, tujuan penambahan modal yaitu untuk menaikan volume produksi, penjualan dan pendapatan serta menaikan laba. Kekurangan modal menjadi masalah penting dalam proses kegiatan usaha tani, maka penambahan modal dapat dilakukan dengan meminjam atau kredit pada bank atau lembaga keuangan lainnya, baik formal maupun informal.



Gambar 83. Trend realisasi penyaluran KUR sektor Pertanian berdasarkan kepulauan

Trend realisasi penyaluran KUR sektor Pertanian berdasarkan kepulauan dapat diperlihatkan pada gambar. Realisasi KUR terendah berada di Pulauan Maluku dan Papua dengan nilai realisasi 14,2%. Sedangkan realisasi KUR tertinggi berada di Pulau Sumatera dengan nilai realisasi 100,8%. Rendah atau tinggi realisasi penyaluran KUR ini dipengaruhi oleh beberapa factor. Salah satunya sentra produksi komoditas yang di usahakan dan juga aturan kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mulai menerapkan Permenko No 1 Tahun 2022 terkait graduasi penerima KUR. Selain itu komoditas setiap pulau juga memiliki keunggulan masing-masing. Wilayah Sumatera memiliki keunggulan komoditas perkebunan sawit dengan target Rp 33 Milyar dari Rp 100 Milyar (33 % alokasi KUR).

Tabel 16. Target dan realisasi KUR Pertanian per Sub Sektor TA 2023

No.	Sektor	Realisasi	Realisasi	%	Jumlah Debitur
1.	Tanaman Pangan	28.000.000.000.000	18.901.015.815.435	67,50	484.498
2.	Hortikultura	15. 000.000.000.000	7.829.176.176.055	52,19	186.596
3.	Perkebunan	33.000.000.000.000	32.174.492.584.291	97,50	474.202
4.	Peternakan	24.000.000.000.000	14.594.234.292.953	60,81	314.022
5.	Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (mixed farming)	0	6.163.925.276.609	0	164.407
6.	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	0	911.933.197.000	0	17.855
	Total	100.000.000.000.000	80.574.777.342.343	80,57	1.641.580

Serapan KUR Sektor Pertanian Tahun 2023 menurut sumber data yang dihimpun dari SMI Ditjen Perbendaharaan totalnya hingga Rp 80,57 Triliun dengan jumlah debitur 1,64 juta dan *Non Performan Loan (NPL)* KUR Pertanian sebesar 0,03%. Serapan tertinggi berada di sektor perkebunan mencapai 97,5%, diikuti sektor tanaman pangan 67,5% dan Peternakan 60,81%.

3.5. Standardisasi Instrumen Pertanian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan sertifikasi. Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur produk dan/atau jasa di dalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, Kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan.

Sektor pertanian ke depan mempunyai tantangan yang kompleks diantaranya degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, serta perubahan iklim. Permasalahan kualitas lahan pertanian telah terjadi di Jabar, Jatim dan NTT, hal ini berdasarkan survei pertanian terintegrasi tentang areal pertanian produktif dan berkelanjutan oleh BPS pada tahun 2020. Di sisi lain, produksi pertanian sangat diperlukan untuk penyediaan pangan bagi sekitar 273 juta penduduk Indonesia dan sebagaian besar dihasilkan oleh 27,7 juta petani kecil dengan luas kepemilikan lahan rata-rata <0,5 ha. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjamin kecukupan bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, diperlukan adanya standar instrument pertanian.

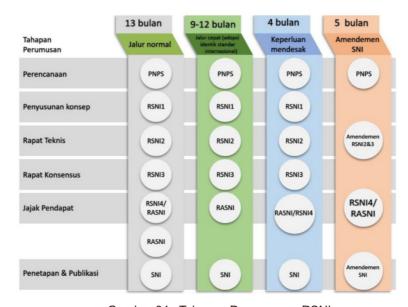
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Perumusan SNI merupakan subsistem dari Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Perumusan standar pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam proses pencapaian kesepakatan atau konsensus.

Perumusan standar didasarkan pada Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sehingga Perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.



Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) pada t-1. Program Nasional Perumusan Standar adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Setelah PNPS yang diusulkan disetujui, maka disusun Rancangan SNI sebagaimana dalam gambar berikut. Adapun yang masuk dalam standar instrument pertanian meliputi:

- Alat dan mesin pertanian yang dipakai *on farm* dan *off farm* untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin : pengolahan lahan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian, termasuk alsin yang berbasis *Al, loT* dan *Cyber Physical System*);
- Sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk dan pestisida);
- Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS;
- Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan



Gambar 84. Tahapan Penyusunan RSNI

Untuk mendukung perumusan SNI, maka dibentuk Komisi Teknis (Komtek) sesuai dengan Peraturan BSN Nomor 8 Tanhun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia. BSIP sudah mempunya 12 Komtek yaitu:

- Tanaman Pangan (65-11)
- Hortikultura (65-15)
- Perkebunan (65-18)
- Bibit dan Produksi Ternak (65-16)
- Pakan Ternak (65-17)
- Kesehatan Hewan (11-16)
- Kesehatan Masyarakat Veteriner (65-20)



- Sumber Daya Lahan Pertanian
- Pertanian Berkelanjutan
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian (65-21)
- Pascapanen Pertanian (65-22)
- Sarana dan Prasarana Pertanian (65-04)

Selain penyusunan standar, dilakukan pendampingan lembaga penerap standar. Pendampingan dilakukan pada 53 lembaga penerap standar meliputi kelompok tani, koperasi, Industri Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Wanita Tani, Perseroan Terbatas, CV, asosiasi pelaku usaha serta pondok pesantren. SNI yang diterapkan ada 53 SNI yang telah ditetapkan sebelum tahun 2023 yaitu 44 SNI Produk, 5 SNI sistem, 3 SNI proses dan 1 SNI Personil. Lebih rinci, Lembaga penerap dan SNI yang diterapkan dapat di lihat pada lampiran.

Berbagai komoditas pertanian yang menjadi fokus dalam penerapan standar yaitu sapi, ayam KUB, cabai, bawang merah, cokelat, aren, jahe, kakao, kelapa, nanas, kopi, krisan, lada, manggis, padi, pala, pinang, pisang, pupuk organik, vanili, bayam merah, pakcoy, dan sayur segar lainnya. Sebaran pendampingan komoditas ekspor yang dilaksanakan di BPSIP TA 2023 dapat dilihat pada Gambar 85.



Gambar 85. Pendampingan Lembaga Penerap Standar Pertanian

Pendampingan Lembaga penerap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen pertanian yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan pengolahan komoditas pertanian. Dengan adanya penerapan standar yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pendampingan penerapan standar yang dilakukan oleh BPSIP selama tahun 2023 telah memperoleh hasil diantaranya: telah diperolehnya sertifikat SNI pada Lembaga yang didampingi oleh BSIP Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Banten, Sulawesi Barat, serta dibangunnya screenhouse untuk komoditas krisan di Sulut dan vanili di NTB.

Untuk mendukung penerapan standar yang semakin meluas, maka BSIP melakukan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dalam rangka memberi informasi, pengetahuan dan keterampilan para penerap standar, sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan standar pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi dan jagung.



Kegiatan dilaksanakan di tujuh provinsi lokasi pengembangan komditas padi dan jagung nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Peserta kegiatan secara umum terdiri dari penyuluh/PPL, petani penangkar dan petani. Peserta kegiatan mencapai 7.031 orang, dengan komposisi peserta 72,79% petani, 17,71% Penyuluh Pertanian, dan lainnya (Camat, Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas) sebanyak 13,36%.

Cakupan materi yang disampaikan terdiri dari aspek: (1) Program dan kebijakan peningakatan produksi padi dan jagung; (2) *Good Agricultural Practices (GAP)* padi dan jagung; (3) Teknologi perbenihan padi dan jagung. Narasumber berasal dari institusi yang kompeten di bidang komoditas padi dan jagung mencakup perbenihan, GAP, GHP dan penerapan standar lainnya yang dibutuhkan di lokasi.

Penerapan standar juga didukung melalui anggaran pinjaman luar negeri. Kementerian Pertanian melalui BSIP bersama dengan *World Bank* pada tahun 2022 telah menyusun Program *Integrated Corporation of Agriculutural Resources Empowerment (ICARE)* yang difokuskan pada komoditas-komoditas bernilai ekonomis tinggi, untuk mitigasi adanya risiko impor komoditas strategis yang cenderung terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah (*value-added*) sektor pertanian dan tentunya untuk mendorong ekspor. Melalui program *ICARE* yang didukung oleh Bank Dunia dan Bappenas, BSIP telah merancang pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan standar instrumen pertanian di Indonesia.

Program *ICARE* BSIP difokuskan pada pembangunan kawasan penerapan standar instrumen pertanian dengan dukungan dari korporasi petani. Program ini dijalankan selama 5 tahun, dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2027, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BSIP, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, *off taker*, serta *stakeholder* lainnya. Lokasi kegiatan mencakup 9 provinsi di Indonesia, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Fokus komoditas tahun 2023 yaitu tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (kentang, pisang, mangga, jeruk), perkebunan (Kopi, kelapa, kakao) dan peternakan (kambing, domba, sapi perah, ayam KUB, dan sapi potong). Lebih rinci, lokasi dan komoditas *ICARE* dapat di lihat pada Gambar 86.



Gambar 86. Lokasi dan komoditas ICARE di 9 (sembilan) provinsi





3.6. Sertifikasi Karantina

Sertifikasi Karantina Pertanian dilaksanakan di 50 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian seluruh Indonesia. Sertifikasi meliputi kegiatan dokumen masuk, dokumen keluar, ekspor dan impor. Pelaksanaan sertifikasi kurun waktu tahun 2022 s.d. tahun 2023 mengalami peningkatan dari 1.588.306 pada tahun 2022 menjadi 1.685.550 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 6,12%, baik Sertifikasi Karantina Hewan maupun tumbuhan. Terperinci peningkatan tersebut terdiri dari sertifikasi karantina hewan dari 715.948 pada tahun 2022 meningkat menjadi 737.777 tahun 2023 atau meningkat sebesar 3,05%. Sedangkan sertifikasi karantina tumbuhan dari 872.358 tahun 2022 menjadi 947.773 tahun 2023 atau meningkat sebesar 8,64%. Terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Frekuensi Kegiatan Operasional Karantina Hewan tahun 2022-2023

No.	Jenis Pelayanan	Dokumen Keluar	Dokumen Masuk	Ekspor	Impor
	Karantina Hewan	415.329	248.767	17.002	34.850
2022	Karantina Tumbuhan	434.798	178.452	174.990	84.118
	Jumlah	850.127	427.219	191.992	118.968
	Karantina Hewan	424.880	259.541	19.486	33.870
2023	Karantina Tumbuhan	460.640	224.742	179.475	82.916
	Jumlah	885.520	484.283	198.981	116.786







4.1 Kinerja DAK Pertanian dan Subsidi Pupuk

4.1.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian

Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung Tematik Penugasan Pengembangan *Food Estate* (7 Kab *FE* dan 41 Kab Penyangga *FE*) dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (100 Kab dan 32 Provinsi). Fokus Penuntasan Infrastruktur fisik Kawasan *Food Estate* dan Penyangganya serta Mendukung MP Korporasi Petani dan Nelayan, yang terpenting dari semua itu adalah Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dari hulu, *on farm* sampai hilir.

Kebijakan tematik penugasan telah ditetapkan, maka upaya kita untuk mengevaluasi ketercapaian tersebut perlu dilihat kembali target dan sasaran kebijakan yang telah direncanakan dan diputuskan. Apakah fokus kegiatan dan fokus lokasi sudah sesuai dengan tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Apakah benar Produksi komoditas, nilai tambah dan Kesejahteraan petani meningkat. Sudahkah dukungan sarana dan prasarana tersedia dan memadai di lokasi FE dan sentra produksi. Apakah Losses dan limbah pangan berkurang.



Berdasarkan rancangan awal hingga penetapan rencana kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023, berikut ini Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2023 di Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Dalam menyediakan infrastruktur dasar pertanian, kegiatannya mendukung pada penyediaan infrastruktur benih dan perbibitan; proteksi tanaman; jalan pertanian; irigasi pertanian; fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian; dan modernisasi prasarana dan sarana pertanian sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 18. DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Pertanian

No.	Menu	Vol	Nilai RK	Kab/Kota
1.	Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian	1.807	347.868.168.750	99
2.	Pembangunan Jalan Pertanian	2.253	465.416.667.974	129
3.	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya	3.257	288.313.919.851	102
4.	Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	1.750	137.532.813.980	111
5.	Pembangunan Olahan Pakan Ternak	254	98.852.002.000	52
6.	Sarana dan Prasarana Pertanian	2.763	405.283.315.494	127
7.	Pertanian Presisi dan Regeneratif	17	17.068.407.100	15
	DANA PENUNJANG		65.317.906.971	
	Total	12.101	1.825.653.202.120	



No.	Menu	Vol	Nilai RK	Provinsi
8.	Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian		130.085.305.147	23
9.	Pembangunan Jalan Pertanian		102.789.219.930	25
10.	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya		193.551.598.427	32
11.	Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya		28.710.164.629	6
	DANA PENUNJANG		20.250.958.968	
	Total	949	475.387.247.101	
	Grand Total (A+B)		2.301.040.449.221	

Sumber: Biro Perencanaan diolah

Alokasi DAK Fisik Tahun 2023 sebesar Rp2,301,040,449,221. Adapun kegiatan dan anggarannya ditujukan kepada Perangkat Daerah lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun besaran anggaran DAK Fisik Provinsi adalah Rp 475,387,247,101. Kegiatan DAK Fisik Bldang Pertanian Provinsi diarahkan untuk 1) Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya; 2) Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya; 3) Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya; 4) Renovasi UPTD/Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak serta sarana pendukungnya. Adapun besaran anggaran DAK Fisik Kabupaten/Kota adalah Rp 1,825,653,202,120. Kegiatan DAK Fisik Bldang Pertanian Kabupaten/Kota diarahkan untuk Pengembangan Sumber-Sumber Air Irigasi air tanah (dangkal/sedang/dalam) Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perekebunan dan Peternakan serta Embung; Pengembangan Jalan Pertanian Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi; Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya; Pusat Kesehatan Hewan, Pembangunan Olahan Pakan Ternak; Sarana dan Prasarana Pertanian; Pertanian Presisi dan Regeneratif.

Jenis DAK Fisik Penugasan ini memiliki konsekuensi bahwa Kementerian Pertanian harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi lokasi prioritas dan kegiatan yang lebih spesifik. Pada prinsipnya, DAK secara eksplisit dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan banyak lainnya sehingga tidak dapat dialokasikan secara rutin setiap tahun. Dengan pengertian tersebut, meskipun alokasi DAK bersifat tahunan, namun substansi program dan kegiatan yang dibiayai oleh DAK harus berada dalam perencanaan



Mekanisme pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pertanian setiap tahunnya mengacu pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Setelah RK ditetapkan, maka kewajiban selanjutnya Perangkat Daerah ialah melakukan penginputan data kontrak sampai dengan 21 Juli pada tahun anggaran berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui komitmen pelaksanaan pekerjaan/kegiatan, sebab bila data kontrak tidak terinput sesuai dengan nilai penetapan RK-nya maka penyaluran yang akan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebesar data kontrak yang di input saja. adalah penginputan data kontrak yang diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis dan mendukung pencapaian ketersediaan akses dan kualitas pangan serta peningkatan nilai tambah dan industrialisasi.







Gambar 87. Tahapan Pembangunan Gudang Benih UPTD Perbenihan Tanaman Pangan

Progress Pembangunan fisik kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2023 wajib di laporkan dalam aplikasi emonev.pertanian.go.id. Setiap tahapan mulai dari 0 sampai dengan selesai 100 % harus dilaporkan dalam aplikasi tersebut agar dapat di pantau oleh eselon I pengampu di Kementerian Pertanian. Perangkat Daerah yang melaporkan wajib mengupload foto berdasar titik ordinat kegiatan tersebut. Pelaporan dalam aplikasi ini juga telah melibatkan Bappeda di Provinsi maupun Kabupaten Kota sebagai verifikator. Hal ini dirasa sangat bermanfaat bagi Bappeda karena di fasilitasi dan dilibatkan dalam pelaporan.



Keberhasilan DAK tematik ini dapat terlihat bilamana fokus kegiatan dan fokus lokasi sudah terjadi interkoneksi antar bidang/sector pengampu tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Terutama dukungan bidang lain terhadap pertanian (Infrastruktur Air, Jalan, Perdagangan dan lingkungan). Apakah benar Produksi komoditas, nilai tambah dan Kesejahteraan petani meningkat. Sudahkah dukungan sarana dan prasarana tersedia dan memadai di lokasi *FE* dan sentra produksi. Apakah Losses dan limbah pangan berkurang.







Gambar 88. Tahapan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan

Manfaat tematik DAK Fisik Pertanian ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP 103-105); ketersediaan beras 46,8 juta ton; ketersediaan daging 4,6 juta ton; nilai tambah per tenaga kerja pertanian: Rp54,30juta/tenaga kerja/orang/ tahun pada sentra produksi dan kawasan *Food Estate*. Adapun sasarannya adalah Produksi meningkat; Kesejahteraan petani meningkat; nilai tambah meningkat; Dukungan sarana dan prasarana tersedia; *Losses* dan limbah pangan berkurang.



Kebijakan Dana Alokasi Khusus Ketahanan Pangan dan Pertanian DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2023 mendukung penguatan ketahanan pangan dan pertanian mengacu pada kriteria lokasi berikut ini: 1) 596 kabupaten/kota mendukung pendataan pertanian oleh penyuluh pertanian di daerah; 2) 417 kabupaten/kota pengembangan kawasan peternakan berdasarkan Kepmentan No.472 tahun 2018 dan: 3) 337 kabupaten/kota *stunting* tahun 2022 berdasarkan Kepmen PPN/Bappenas Nomor KEP 10/M.PPN/HK/02/2021.



Tabel 19. Capaian Kinerja DAK Non Fisik Bidang Ketahanan Pangan TA 2023

No.	Kegiatan	Alokasi		Realisasi				
NO.	Negiatan	Anggaran	Output	Anggaran*	%	Output	%	
A.	Perkarangan Pangan Lestari (Penumbuhan)	95.791.025.000	1.236	87.343.434.608	91,2	1.127	91,2	
B.	Pendataan Data Petani	63.767.500.000	5.545	54.441.000.000	85,4	4.734	85,4	
C.	Puskeswan	140.486.475.000	933	129.042.775.000	91,9	857	91,9	
Total		300.045.000.000		270.827.209.608	90,26			

Target DAK Non Fisik TA 2023 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ini adalah sebanyak 1255 Kelompok Masyarakat di 337 Kabupaten/Kota lokus *stunting*, 933 unit Puskeswan di 417 Kabupaten/Kota, 5782 Balai Penyuluhan Pertanian. Selain itu, besaran alokasi dana ini juga didasarkan kepada jumlah kelompok masyarakat peserta Program P2L yang didanai oleh Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan yang melakukan pendataan pertanian dan sistem pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pertanian.DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2023 mendukung penguatan ketahanan pangan dan pertanian.







Gambar 89. Kegiatan Rumah Benih, Pelayanan Keswan dan Pelatihan Tematik Pupuk Organik di BPP

Capaian *output* kegiatan DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian paling tidak harus terealisasi 90 % dan capaian realisasi keuangannya minimal 92%. Capaian *output* Tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang telah disepakati, meskipun realisasi keuangannya masih terus bertambah hingga batas penyaluran rekomendasi tahap 1 tahun 2024 ditetapkan sampai 30 Juni 2024.



Berhasil atau tidaknya sektor pertanian dalam memanfaatkan sinergi pendanaan dalam kerangka UU HKPD akan ditentukan oleh penyusunan keselarasan *output-outcome* antara pusat dan daerah terkait prioritas nasional apa yang akan dicapai, dimana lokus sumber pendanaan yang berasal dari DAK Nonfisik DKPP dengan DAK Fisik Tematik Penugasan Sentra Produksi Pangan dan *Food Estate*.

Selain itu sinergi ini bertujuan mendorong daerah untuk mengembangkan *creative and sustainable financing* berdasarkan integrasi dan skema sinergi pendanaan yang dapat melibatkan *stakeholder* didaerah. Hal ini untuk mendukung alokasi sumber daya pertanian yang efisien, mendorong peningkatan kualitas belanja pertanian didaerah, serta, harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik sarana dan prasarana pertanian yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

4.1.2. Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, tahun 2023 ini telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar lebih dari Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan sekitar 16 juta petani, yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utarna, terutarna Pupuk Bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enarn) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Dengan demikian, dalam pengelolaan Pupuk Bersubsidi diperlukan kesepaharnan seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Kementerian Pertanian terus meningkatkan jumlah *plafon* Pupuk Bersubsidi sektor pertanian dari Rp80T pada tahun 2021 menjadi Rp90T pada tahun 2022 dan Tahun 2023 mencapai Rp42,1 triliun atau tumbuh 41,3%. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian, baik melalui penggunaan input sesuai anjuran sehingga produktivitasnya naik dan/atau melalui penambahan luas tanam.

Adapun total alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2023 sebesar 7,86 juta ton. Rinciannya, pupuk Urea 4,64 juta ton, NPK 3,1 juta ton dan NPK Formula Khusus 114 ribu ton, dari rencana produksi Pupuk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,3 juta ton, baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi.

Agar harapan ini dapat dicapai, diperlukan antisipasi dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat kelancaran penyerapan Pupuk Bersubsidi pada sektor pertanian. Selain itu permasalahan Pupuk Bersubsidi adalah juga perlu mengetahui dampak positif yang dihasilkan oleh pupuk bersubsidi.



Hasil pemantauan dan evaluasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum terkait peran pupuk bersubsidi dalam mendukung peningkatan produksi program pembangunan pertanian yang dibiayai melalui APBN Kementan. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani. Di sisi lain, diperlukan optimalisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi yang memang didesain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau.

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 merupakan langkah strategis Pemerintah yang diambil untuk mengoptimalkan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani, agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Langkah dan kebijakan ini juga diambil agar produk hasil pertanian Indonesia terutama yang memiliki kontribusi terhadap inflasi bisa terus terjaga.

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi 9 komoditas pangan pokok dan strategis, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. "Kesembilan komoditas ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

Adapun untuk jenis Pupuk Bersubsidi yang diberikan kepada petani yakni Urea dan NPK. Dasar pertimbangan dalam kebijakan ini adalah untuk menyederhanakan rantai pasok dan penyaluran Pupuk Bersubsidi agar lebih efisien. Kedua jenis pupuk ini juga dipilih untuk efisiensi pemupukan karena kondisi lahan pertanian saat ini dan kandungan unsur hara makro esensial untuk peningkatan produksi tanaman yang optimal.

Pemerintah juga melakukan upaya untuk memperbaiki Tata Kelola Pupuk Bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan Pupuk Bersubsidi, serta penyusunan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran.

Mekanisme pengusulan alokasi Pupuk Bersubsidi akan dilakukan dengan menggunakan data spasial dan/atau data luas lahan dalam Simluhtan, dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B). Dengan demikian, penyaluran Pupuk Bersubsidi akan lebih akurat dan tepat sasaran.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan memperbaiki tata kelola Program Pupuk Bersubsidi dalam pembangunan ekonomi di sektor Pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Per 31 Desember 2023 masing-masing; Urea 3,68 juta ton (79,17%), NPK 2,48 juta ton (79,85%) dan NPK Formula Khusus 37,3 ribu ton (32,7%).

Tabel 20. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2023

	Jamia Dunada	a Alabasi Catabaa	Realisasi			
No.	No. Jenis Pupuk	e_Alokasi Setahun	Volume (Ton)	% Terhadap Alokasi		
A.	UREA	4.642.703	3.675.637	79,17		
B.	NPK	3.100.215	2.475.565	79,85		
C.	NPK Formula Khusus	114.033	37.327	32,73		
1.0	Total	7.856.951	6.188.528	78,77		

Sumber: PT. Pupuk Persero Indonesia (Persero), Desember 2023 diolah

Tantangan *el nino* (kemarau panjang) tahun ini memang cukup berat. Produksi harus digenjot lagi agar petani di lumbung-lumbung pertanian kita bergairah dengan adanya pupuk yang cukup. Penyaluran pupuk bersubsidi yang lambat dan tidak sesuai dengan target disebabkan oleh kegiatan pertanaman yang menurun akibat terbatasnya sumber air yang diperoleh petani pada kemarau panjang tahun 2023.

Selain itu data e-Alokasi belum sepenuhnya padu padan dengan data kependudukan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (NIK Kemendagri). Permasalahan inilah yang kemudian muncul dan ditengarai menjadi isu publik tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Petani yang tidak masuk dalam kelompok penerima pupuk bersubsidi ini padahal dia berhak menerimanya, biasanya disebabkan data kependudukan dan verifikasi serata validasi yang tidak terjangkau oleh penyuluh pertanian di daerah.

4.2. Kemiskinan Ekstrem, dan Stunting (Biofortifikasi)

4.2.1. Kemiskinan Ekstrem

Pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 (nol) persen tinggal menyisakan waktu yang singkat, mengingat masa berlaku Inpres Nomor 4 Tahun 2022 akan berakhir pada 31 Desember 2024. Kementerian dan Lembaga harus memastikan intervensi program terlaksana dan diterima penduduk miskin ekstrem dengan data sasaran dan target serta waktu yang jelas. Intervensi program seharusnya berpedoman pada data pensasaran yang di tampilkan dalam Dashboard P3KE sehingga pemantauan ketepatan sasaran dan waktu bisa dimonitor bersamasama pada Agustus 2023 dan untuk tahun 2024 dilaksanakan awal tahun paling lambat Februari 2024.

Peningkatan kualitas pelaksanaan program, mengembangkan dan memutakhirkan basis data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antar K/L dengan program daerah maupun non-pemerintah merupakan prasyarat utama. Menguatkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan tujuan utama dari Inpres 4/2022 dapat tercapai.

a. Kinerja Anggaran dan Kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2023 kegiatan sektor Pertanian dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari APBN Kementerian Pertanian. Strategi sektor pertanian menggunakan strategi terhadap peningkatan pendapatan dan akses pekerjaan. Kegiatan TA 2023 yang telah dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang memiliki karakteristik pelaksanaan/metode pelaksanaan yang diidentifikasi dapat mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pada tahun anggaran 2023 proses dynamic tagging pada Rincian Output baru disosialisasikan pada bulan Maret dan di putuskan Agustus 2023, maka kegiatannya menyesuaikan dengan RO *Dynamic Tagging*. Realisasi pelaksanaan kegiatan PPKE di Kementerian Pertanian hingga 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam Tabel 21.





Tabel 21. Alokasi dan Realisasi Kegiatan Kementerian Pertanian mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

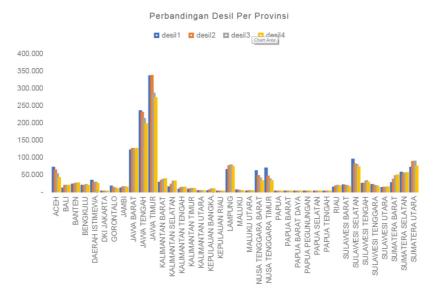
No.	Rincian Output (RO)	Pemetaan Awal	Kode Rincian Output (RO)	Status Tertagging 2023	Alokasi Awal 2023	Alokasi Setelah Assesment	Realisasi B12	%
1.	001-Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan		4580.RAI.001	V	168.345.540	59.206.580	53.096.160	89,68
2.	001-Asuransi Pertanian		3994.RBK.001	V	158.735.949	43.762.078	44.000.000	92,86
3.	001-Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	v	1810.QDD.001	v	15.927.050	30.145.177	27.657.389	91,75
4.	001-Jaringan Irigasi Tersier	V	1794.RDK.001	V	240.975.000	83.025.000	77.100.000	92,86
5.	001-Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	v	5892.QDC.001	v	17.222.000	111.264.671	115.563.403	103,86
6.	001-Nursery		5890.RBK.001	V	30.066.443	30.066.443	8.633.207	28,71
7.	002-Area Penanganan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan		1779.RAI.002	V	40.852.309	20.034.065	15.872.165	79,23
8.	002-Areal Penanganan DPI		4580.RAI.002	V	3.973.805	223.805	223.055	99,66
9.	002-Asuransi Usaha Ternak	V	3994.RBK.002	V	26.855.000	3.200.000	3.200.000	100,00
10.	002-Embung Pertanian	v	1794.RBK.002	rekomendasi		22.360.000	22.360.000	100,00
11.	003-Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani		1812.QDD.003	V	34.000.000	34.000.000	33.352.914	98,10
12.	004-Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	v	1812.QDD.004	v	11.906.304	67.338.650	66.851.885	99,28
13.	004-Ternak Unggas dan Aneka Ternak	v	185.QEL.004	v	56.503.990	6.043.799	5.941.460	98,31
	Total				805.363.390	510.670.268	473.852.008	92,79

Kemiskinan ekstrem adalah masalah yang kompleks dan multifaktorial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan konvergensi yang holistik dan mencakup berbagai upaya. Penciri kemisikinan ekstrem di Indonesia adalah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, yang berarti menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat miskin ekstrem yang bekerja pada sektor pertanian. Diperlukan basis data yang kredibel antara data yang dirilis oleh Instansi/Lembaga pemerintah. Sumber data yang menjadi pedoman berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem (PPKE). Sedangkan Kementerian Pertanian memiliki data petani yang terverifikasi dalam aplikasi Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) by Name by Addres (BNBA) berdasarkan komoditas yang diusahakan. Kedua sumber data tersebut telah dilakukan pemadanan/penapisan data agar diperoleh data BNBA penerima manfaat yang benar benar tergolong miskin ekstrem pada desil 1-4.

Progress pemadanan data telah dilakukan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dengan Biro Perencanaan. Dari proses cleansing data PPKE berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menghilangkan NIK berganda/kosong diperoleh hasil data by name by address sebanyak 52,6 juta individu pada desil 1 – 4.

Dari sejumlah data tersebut, kami telah memadupadankan dengan data petani pada aplikasi Simluhtan sehingga didapatkan sebanyak 5,6 juta individu (10,73% dari data awal) yang berstatus sebagai petani dan memiliki kelompok yang teregistrasi pada Simluhtan, serta berada pada desil 1 –4 di dataset P3KE.





Gambar 90. Perbandingan desil per provinsi Tahun 2023

1) Kegiatan PPKE di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Kegiatan yang diidentifikasi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada subsektor tanaman pangan adalah Gerakan Pengendalian DPI, Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. Kegiatan ini dapat membantu petani yang terkategori miskin ekstrem menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu, sehingga dapat meminimalisir risiko atau dampak akibat perubahan iklim. Dampak perubahan iklim tersebut sangat mempengaruhi peningkatan produksi akibat gagal panen/puso karena kekeringan dan banjir, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan petani yang jika tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan jumlah petani miskin ekstrem.

Salah satu kegiatan yang sesuai strategi peningkatan pendapatan petani ialah dengan menjaga hasil produksinya dari serangan hama pengganggu yang dapat menurunkan produksi dan pendapatan petani serealia. Gerakan Pengendalian OPT dengan kode RO 4580.RAI.001. Selain itu strategi dalam peningkatan pendapatan petani adalah dengan cara Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dengan RO Areal Penanganan DPI dan kode RO 4580.RAI.002.

Kegiatan budidaya pertanian tidak pernah bebas dari serangan hama dan perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan mengakibatkan kerugian petani selama bercocok tanam sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu petani menghindari kerugian yang berisiko terhadap penghapusan pendapatannya. Kegiatan ini dialokasikan pada 32 Provinsi untuk Pengendalian OPT Tanaman Pangan Serealia dan 5 (lima) Provinsi untuk penganan Dampak Perubahan Iklim pada Provinsi prioritas dan kabupaten/kota yang di kelompokkan daerah miskin ekstrem.





2) Kegiatan PPKE di Direktorat Jenderal Perkebunan

Kegiatan yang diidentifikasi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada subsektor perkebunan adalah Fasilitasi benih perkebunan. Strategi dalam kegiatan ini adalah dengan cara peningkatan pendapatan dan akses pekerjaan dan padat karya. Kegiatan nursery perkebunan yang di laksanakan merupakan kegiatan yang RO-nya ada di *nursery* Perkebunan dengan kode RO 5890.RBK.001 dan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan kode RO 1779.RAI.002.

Sumber pendanaannya berasal dari APBN dana Tugas Pembantuan. Bantuan yang diberikan berupa akses terhadap pekerjaan dan padat karya perbenihan perkebunan yang tersebar pada 12 Provinsi dan 8 Kabupaten Kota untuk kegiatan Nursery sedangkan kegiatan Penanganan OPT Perkebunan berada di 22 Provinsi dan 20 Kabupaten.

3) Kegiatan PPKE di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kegiatan yang diidentifikasi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada subsektor peternakan adalah bantuan ternak unggas dan aneka ternak dengan kode RO 1785.QEL.004. Strategi dalam kegiatan ini adalah dengan cara peningkatan pendapatan dengan memberikan ternak unggas dan aneka ternak. Secara berkelompok, peternak, dapat bersama-sama memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan pendapatan peternak. Pemberian bantuan paket ternak unggas berupa ayam buras usia 4 minggu, bantuan pakan 3 bulan dan bantuan untuk kendang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran berjalan

Kegiatan yang di laksanakan merupakan kegiatan dengan RO bantuan ternak unggas dan aneka ternak. Sumber pendanaannya berasal dari APBN dana Tugas Pembantuan. Bantuan yang diberikan ini diperuntukkan bagi peternak dalam upaya produksi ternak unggas supaya tercapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan asal ternak yang tersebar pada 18 Provinsi dan 71



4) Kegiatan PPKE di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan yang diidentifikasi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada kegiatan pendukung prasarana dan sarana pertanian diantaranya Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) kode RO 1794.RDK.001, Asuransi Pertanian kode RO 3994.RBK.001, Asuransi Usaha Ternak kode RO 3994.RBK.002 dan Embung Pertanian kode RO 1794.RBK.002. Strategi dalam kegiatan ini adalah dengan cara peningkatan pendapatan dari prasarana pendukung utama pada pertanaman dan berpengaruh terhadap Indeks Pertanaman.

Kegiatan yang di laksanakan merupakan kegiatan dengan RO sarana pengairan. Sumber pendanaannya berasal dari APBN dana Tugas Pembantuan. Bantuan yang diberikan ini diperuntukkan bagi petani yang memperoleh kesulitan sumber air yang tersebar pada 31 Provinsi dan 309 Kabupaten Kota. Dengan bantuan ini diharapkan dapat mendukung budidaya pertanian yang dilakukan petani sehingga dapat meningkatkan hasil produksi, memperbaiki kualitas produksi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Asuransi Pertanian dalam hal ini Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani dari risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. AUTP pada TA. 2023 dialokasikan di 32 Provinsi.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan dengan cara memperbaiki/menyempurnakan jaringan irigasi tersier untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi maupun Embung Pertanian dilaksanakan pada 31 Provinsi. Tahapan pelaksanaan jaringan irigasi pertanian melibatkan pertisipasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan konstruksi, pelaporan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibimbing/dibina oleh petugas dinas pertanian dan instansi terkait. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan material, dana dan pemeliharaan.

5) Kegiatan PPKE di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Kegiatan yang diidentifikasi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dalam mendukung sumberdaya manusia pertanian adalah kegiatan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) kode RO 5892.QDC.001, untuk Peningkatan Kapasitas Petani, Koordinasi Kegiatan SIMURP dengan kode RO 1812.QDD.004, Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani dengan kode RO 1812.QDD.003, Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani dengan kode RO1810.QDD.001.

Strategi dalam kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, dan pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro. Kegiatan yang di laksanakan merupakan kegiatan dengan RO fasilitasi kewirausahaan muda. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Bantuan yang diberikan ini diperuntukkan bagi petani yang memperoleh kesulitan permodalan, akses pembiayaan yang tersebar pada 15 Provinsi.

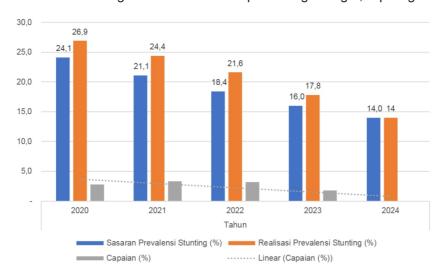


4.2.2. Penurunan Stunting dengan Padi Kaya Gizi Biofortifikasi

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Prevalensi Stunting* yang merupakan legalisasi dari Dokumen Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Stranas *Stunting*). Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tahun 2020 mulai menggencarkan percepatan tanam padi agar ketersediaan beras terus terjamin bahkan guna mengatasi stunting atau anak tumbuh kerdil. Upaya maksimalisasi penanaman benih padi Inpari IR Nutri Zinc jadi solusinya. Kementerian Kesehatan menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas rawan prevalensi *stunting* dari 260 kabupaten/kota.

Kegiatan dalam dokumen Stranas *Stunting* berupa bantuan benih budidaya padi kaya gizi (biofortifikasi). Budidaya padi biofortifikasi ditujukan untuk penyediaan beras yang kaya gizi, terutama untuk mengatasi kondisi *stunting*. Padi varietas hasil penelitian padi Kementan, mulai tahun 2020 diujicobakan di beberapa wilayah di Indonesia, pada 9 (Sembilan) provinsi dan 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota dan dilanjutkan pada tahun 2021 in pada 26 (dua puluh enam) provinsi dan 103 (seratus tiga) kabupaten/kota.

Berdasarkan data WHO, prevalensi balita *stunting* Indonesia menyumbang prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara dengan angka rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Sedangkan pada tahun 2013-2024, angka prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2013-2021. Sedangkan tahun 2024 merupakan angka target, seperti grafik berikut.



Gambar 91. Target Penurunan Prevalensi Stunting 2020-2024

Dari capaian *prevalensi stunting* pada tahun 2022, diperkirakan capaian *prevalensi stunting* pada tahun 2023 sebesar 17,8 atau turun 3,8% untuk mencapai tahun 2024 sebesar 14%. Program percepatan penurunan *stunting* terkait intervensi gizi sensitif potensial untuk menurunkan *stunting*. Intervensi Program Gizi Sensitif dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui pemberian padi kaya gizi biofortifikasi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kegiatan (HPK) (dimulai ibu hamil hingga menyusui dan pemberian makanan pendamping anak sampai usia 3 tahun).



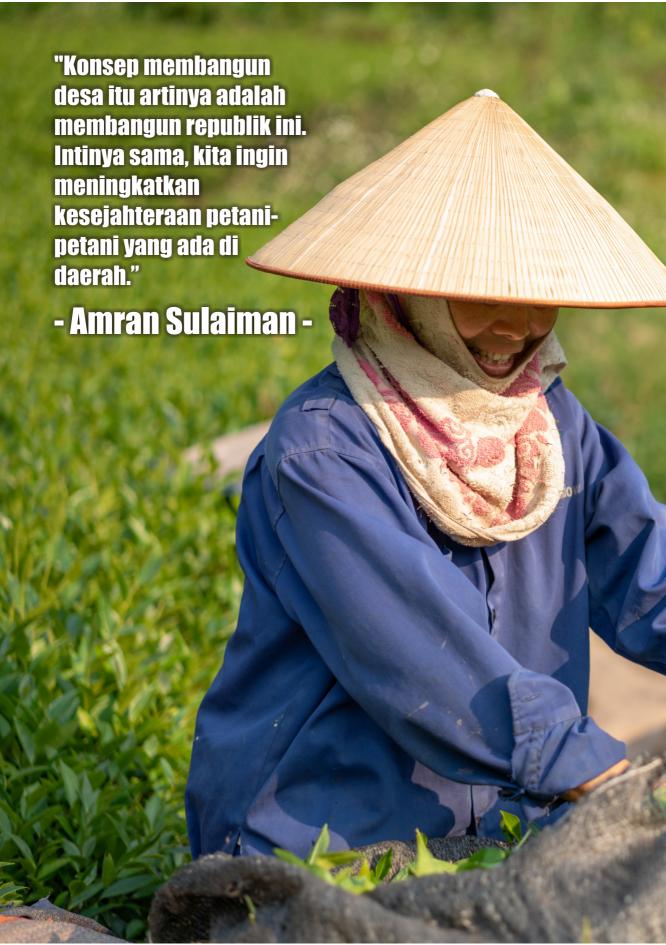
Berdasarkan laporan daerah, pelaksanaan kegiatan budidaya padi biofortifikasi tahun 2023, dari sasaran alokasi luas tanam kegiatan seluas 150.000 ha terlaksana 142.412 ha (94.9%). Produktivitas rata-rata yang dihasilkan mencapai 55,7 ku/ha (106,3%) dari sasaran produktivitas 52,40 ku/ha. Dengan luas panen yang diperoleh 142.412 ha (98,3%) dari sasaran luas panen seluas 144.810 ha, capaian produksi padi biofortifikasi yang dihasilkan sebesar 793.065 ton GKG (100,57%) dari sasaran produksi sebesar 758.804 ton GKG atau setara dengan produksi beras (konsumsi) sebesar 454.997 ton beras. Secara rinci sasaran dan realisasi capaian produksi padi biofortifikasi dalam table berikut.

Tabel 22. Sasaran dan Realisasi Padi Biofortifikasi Tahun 2023

Urajan	Tahun 2023					
Oralali	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)			
Anggaran (Rp.000)	226.531.330	208.922.350	92,2			
Sasaran Alokasi (ha)	150.000	142.412	94,9			
Luas Tanam (ha)	150.000	142.412	94,9			
Luas Paneni (ha)	144.810	142.412	98,3			
Produktivitas (ku/ha)	52,40	55,7	106,3			
Produksi (ton/GKG)	758.804	793.092	104,5			
Produksi (ton beras)	435.326	454.997	104,5			

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Budidaya Padi Biofortifikasi disebabkan beberapa faktor. Permasalahan pertama adalah bulir gabah lebih kecil ukurannya dari pada gabah padi pada umumnya. Hal ini menyebabkan harga gabah dihargai lebih rendah dari harga gabah padi pada umumnya. Pedagang pengumpul sebagai pembeli gabah petani menghargai dari penampilan gabahnya. Selanjutnya permasalahan kedua, tekstur nasi yang kurang pulen sehingga mempengaruhi tingkat preferensi masyarakat/konsumen dalam membeli/mengkonsumsi beras biofortifikasi. Preferensi masyarakat/konsumen terhadap beras biofortifikasi mempengaruhi minat petani untuk menanam karena permintaan berasnya yang tidak besar dan akan mempengaruhi harga jual di tingkat petani.

Dibalik permasalahan tentunya sangat terbuka peluang bagi pengambangan padi biofortifikasi dikarenakan keunggulan produksi dan kandungan gizi tinggi dari varietas unggul baru tersebut. Berdasarkan deskripsinya, padi Varietas Unggul Baru (VUB) Inpari IR Nutri Zinc termasuk varietas umur genjah dengan umur tanaman ± 115 hari. Bentuk tanaman tegak dengan tinggi tanaman hanya ± 95 cm. Daun bendera tegak. daun rimbun, relatif kecil panjang, dan malai tersembunyi di dalam daun sehingga relatif aman dari serangan burung. Tingkat kerontokan sedang, demikian juga tingkat kerebahan. Jumlah anakan produktif sekitar 18 batang per rumpun, jumlah gabah isi per malai ± 96 butir dan bobot 1000 butir ± 24,60 gram. Umur tanaman Inpari IR Nutri Zinc hampir sama dengan varietas Ciherang, demikian juga jumlah anakan produktifnya. Rata rata hasil cukup tinggi 6,21 t/ha, juga setara dengan Ciherang. Potensi hasil bisa mencapai 9,98 t/ha dan rendemen beras giling ± 67,40 %. Tekstur nasi pulen, kadar amilosa 16,60 %.







4.3. Penghargaan dari K/L Lainnya

Pada tahun 2023 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

a. Penghargaan Opini WTP BPK Tahun 2023

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021. Opini WTP yang diraih ini menandai pencapaian Kementan dalam mempertahankan opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 6 Tahun berturut – turut.

b. Penghargaan Praktek Terbaik Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memastikan reformasi birokrasi berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan publik. Sebagai kunci transformasi, inovasi juga dibutuhkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis. Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan kepada Top Inovasi Terpuji.

Adapun, Yang termasuk Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023, salah satunya diraih oleh Kementerian Pertanian, melalui Inovasi *Biochar Three in One (Biotron)*, pada Selasa (21/11/23) di Jakarta. Penyerahan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kementerian Pertanian diwakili oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), dan Inovator *Biotron*.



Gambar 92. Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dari BBPP Binuang



c. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023

Pada 14 Desember 2023 Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari *Ombudsman* RI atas capaian prestasi Peringkat 3 Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelnggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dengan kategori Kepatuhan Tertinggi masuk dalam Zona Hijau kelompok Kementerian. Predikat ini diperoleh dari hasil pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dengan 4 Lokus Penyelenggaran Pelayanan Publik di Kementerian Pertanian dimana salah satu lokus yang di monitoring adalah Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Sekretariat Jenderal) yang meraih nilai kepatuhan standar pelayanan publik pada Zona Hijau dengan nilai 91,45.



Gambar 93. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023

d. BKN Award 2023

BKN mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN *Award* Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN. Adapun penilaian BKN *Award* 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori *special mentio*n yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Kementerian Pertanian berhasil meraih 2 penghargaan yaitu: Peringkat pertama untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik.

Pemberian BKN *Award* bagi pengelola kepegawaian di lingkup Instansi Pusat dan Instansi Daerah ini diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.







Gambar 94. Penghargaan BKN *Award* untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik.

e. Penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaan *Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan ini diserahkan langsung Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, di *The Westin Hote*l, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023). *ASN Culture Fest 2022* adalah *festival virtual best implementation* budaya kerja ASN BerAKHLAK yang diselenggarakan Kemenpan-RB dan diikuti 90 instansi pemerintah terdiri atas kementerian dan lembaga. Penyerahan penghargaan *Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022*.



Gambar 95. Penyerahan penghargaan *Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)



f. Anugerah Top Digital Implementation 2023

Kementerian Pertanian pada tahun 2023 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang *Top Digital Awards 2023*. Adapun penghargaan yang diterima yaitu *'Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 4'* untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan *'Top Leader on Digital Implementation 2023'* untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.

Top Digital Awards 2023 merupakan ajang pemberian penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan. Pada tahun 2023 ini Top Digital Awards 2023 mengusung tema "IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services"/ "Tata Kelola TI dan Keamanan Siber dalam kaitan Inovasi Bisnis dan Layanan".





Gambar 96. Kementan dianugerahi Top Digital Implementation 2023 level star & Top Leader on Digital Implementation 2023

Selaras dengan program pemerintah yaitu menuju pemerintahan digital yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pusdatin memiliki sejumlah strategi dalam penerapan tata kelola TI dan keamanan siber dalam rangka optimalisasi inovasi bisnis dan layanan Kementerian Pertanian yaitu (1) Integrasi data mewujudkan portal satu data pertanian, (2) Integrasi sistem informasi mewujudkan portal satu layanan pemerintahan dan portal satu layanan publik, (3) Peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintah dan layanan publik melalui implementasi SPBE, (4) Peningkatan penerapan Tata Kelola TI dan Keamanan Siber.





g. Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh penghargaan, Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023. Gambar 17 menunjukkan penghargaan Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023.



Gambar 97. Kementan dianugerahi sebagai Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan SPLP Tingkat K/L tahun 2023.

Kementerian Kominfo menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi SPBE Nasional yang dihadiri oleh Dirjen Layanan Aplikasi Informatika (LAIP) Bpk. Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, MM. Kegiatan ini bertujuan sebagai apresiasi kepada instansi yang telah mewujudkan *e-Government* yang baik dan membantu interoperabilitas antar sistem informasi di lingkungan instansi badan pemerintah.

Kementerian Pertanian dalam hal ini Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah melakukan penerapan interoperabilitas antar sistem informasi dan data baik itu antar sistem informasi/data internal maupun interoperabilitas dengan sistem informasi/data instansi lainnya. Interoperabilitas menjadi salah satu perwujudan keterpaduan dari segi infrastruktur, seperti Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dengan Penerapan SPLP yang dilakukan oleh Pusdatin Kementan, maka Pusdatin Kementan turut mendukung terwujudnya *Smart eGovernment* sebagai salah satu tujuan dari SPBE Nasional.



h. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman RI

Ombudsman RI merilis hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Penilaian itu dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Tiga lembaga dengan peringkat tertinggi pada kategori kementerian yaitu Kementerian Luar Negeri dengan nilai 94,85, Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 92,91, serta Kementerian Pertanian dengan nilai 91,45.

Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keaktifan *Ombudsman* pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan.





Gambar 98. Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman

i. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023

Kementerian Pertanian RI menerima penghargaan kategori Kementerian Terbaik, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (19/12/2023). Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Kementan sebagai salah satu badan publik terinformatif dinilai oleh KIP secara proaktif telah menyediakan informasi publik secara akurat dan benar dan memiliki inovasi dalam penyediaan informasi publik. Pada kategori tersebut, Kementan sebelumnya secara berturut-turut pernah meraihnya, yaitu pada tahun, 2020, 2021, dan 2022.



Gambar 99. Kementerian Pertanian mendapat penghargaan "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kategori Kementerian Terbaik"

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama. Pemerintah harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Terlebih, bangsa Indonesia sedang dalam masa pemilihan umum (pemilu).

4.4. Pengendalian Inflasi Sektor Pertanian

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 23 tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2017, Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai salah satu anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Hal tersebut mengingat bahwa komoditas pertanian terutama bahan kebutuhan pokok merupakan hal yang rawan menjadi penyebab inflasi, karena mudah mengalami gejolak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa mengendalikan inflasi melalui sektor pertanian adalah untuk menjaga produksi kebutuhan pokok dan menjaga kelancaran distribusinya. upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mengendalikan inflasi pangan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek ketersediaan pangan melalui: (a) upaya peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (b) menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan; dan (c) mendekatkan pusat produksi kepada konsumen.

DI Indonesia, Inflasi IHK pada Januari 2024 menurun menjadi 2,57% (yoy), dari Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) disumbang oleh penurunan inflasi inti dan stabilnya inflasi AP, sementara inflasi VF (Volatile Food) meningkat. Inflasi inti pada Januari 2024 menurun menjadi 1,68% (yoy), dari1,80% (yoy) pada Desember 2023 didorong oleh perbaikan permintaan domestik yang masih gradual,nilai tukar yang terjaga, tekanan harga global yang menurun,dan ekspektasi inflasi yang terjangkar dikisaran target. Inflasi AP sebesar 1,74% (yoy), relatif stabil dari Desember 2023 yakni 1,72% (yoy), yang terutama disumbang oleh aneka rokok. Namun demikian, inflasi VF meningkat menjadi 7,22% (yoy) dari 6,73% (yoy) pada bulan sebelumnya disumbang terutama oleh peningkatan inflasi beras, bawang putih dan tomat.







Gambar 100. Perkembangan Inflasi Periode Tahun 2017 hingga Januari 2024

Pada tahun 2023, upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pertanian antara lain:

- Distribusi aneka cabai secara rutin ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) sebanyak 3,4 ton setiap hari.
- EWS ketersediaan aneka cabai dan bawang merah sampai Idul Fitri 2024
- Monitoring kawasan cabai dan bawang merah inflasi seluas @1.300 ha. Kawasan *champion* cabai seluas 1.250 ha, *champion* bawang merah 4.792 ha dan kawasan reguler
- Fasilitasi bawang merah intensifikasi 473 ha untuk musim tanam Nov Des 2023
- Penyediaan stok bawang merah di tingkat *champion* sebanyak 1.424 ton untuk bulan Nov 2023 Jan 2024. Stok cabai di *champion* sebanyak 524 ton bulan Des 2023 Jan 2024
- Percepatan kegiatan nurseri 74 juta semaian/ seedling bawang merah biji/TSS dan cabai menggunakan soilblock tahun 2023-2024
- Koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Stakeholder terkait dalam rangka pengaturan harga acuan pembelian atau penjualan (HAP);
- Koordinasi dengan pelaku usaha di daerah dalam rangka penyediaan dan penyaluran stok komoditas pertanian yang defisit;
- Gernas tambah tanam padi terdampak EL Nino
- Akselerasi peningkatan produksi padi dan jagung



4.5. Pengarusutamaan Gender

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Anugerah ini merupakan penghargaan keberhasilan atas prakarsa pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Penghargaan tersebut melengkapi penghargaan keempat yang diraih kementan setelah sebelumnya pada 2016, 2018 dan 2020 juga mendapat anugerah yang sama.



Gambar 101. Penyerahan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laiki-laki.

Dengan diterapkannya PUG di sektor pertanian, peran perempuan yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pertanian meningkat seiring peningkatan pengetahuan dan keterampilan kaum perempuan dalam usaha pertanian. Capaian Kementerian Pertanian dalam usaha penerapan responsive gender diantaranya: 1)meningkatnya peran dan partisipasi perempuan mencapai 30% dalam pelaksanaan beberapa kegiatan diantaranya Optimalisasi Lahan Kering, Pengembangan Embung pertanian; Pengembangan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian; Program AUTP; dan masih banyak lagi kegiatan di sektor pertanian yang melibatkan perempuan; 2) Diterbitkannya Petunjuk teknis Pengembangan Usaha pengelolaan Industri Rumah Tangga Hasil Pertanian Bagi Kelompok Wanita Tani (KWT); 3) Diterbitkannya Panduan Gesi yang merupakan upaya Integrasi Aspek gender dan Disability pada Program YESS.

Saat ini banyak program yang berkaitan langsung dengan strategi pengentasan kemiskinan dipedesaan yang menyentuh kelompok wanita. Salah satunya program penanaman aneka pangan di setiap halaman rumah masyarakat Indonesia yang dikenal dengan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kementerian Pertanian telah menyiapkan jutaan bibit pangan seperti cabai, tomat dan tanaman lain yang dapat menunjang program P2L tersebut.



4.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Hasil Pemeriksaan BPK RI per 8 Januari 2024 diketahui bahwa terdapat 1.921 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Pertanian. Progres hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.21 berikut

Dari 1.921 rekomendasi yang ada, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti penyelesaiannya sebanyak 1.610 rekomendasi atau 83,81% dari total rekomendasi dengan rincian status penyelesaian yaitu status sesuai sebanyak 1.545 rekomendasi (80,43%) dan status TPTD sebanyak 65 rekomendasi (3,38%). Sementara status rekomendasi belum sesuai sebanyak 231 rekomendasi (12,02%) dan status rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 80 rekomendasi (4,16%).

Tabel 23. Data Rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti

	Periode									
Uraian/Status	1 April 2022 2		24 Agust	24 Agustus 2022		4 Juli 2023		us 2023	8 Januari 2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah	1.708		1.782		1.782		1.843		1.921	
a. Sesuai	1.324	77,52	1.433	80,42	1.484	83,28	1.545	83,83	1.545	80,43
b. Belum Sesuai	253	14,81	238	13,36	233	13,08	231	12,53	231	12,02
c. Belum TL	69	4,04	46	2,58	-	-	2	0,11	80	4,16
d. TPTD	62	3,63	65	3,65	65	3,65	65	3,53	65	3,38
e. Penyelesaian	1.386	81,15	1.498	84,06	1.549	86,92	1.610	87,36	1.610	83,81
Progress			112	2,92	51	5,78	61	0,43	-	-3,55





YES, AIR ADALAH KOENTJI BAGI PARA PETANI INDONESIA GUNA HASIL PANEN YANG MELIMPAH

Karena air adalah Koentji para petani, maka sistem irigasi pada proses bertani harus sangat diperhatikan.

Mulai dari jenis irigasinya hingga kualitas airnya. Irigasi adalah upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.





PENUTUP

Sepanjang tahun 2023, Kementerian Pertanian telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan pertanian, yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2023. Selain itu, Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2023, mengungkapkan berbagai capaian, seperti peningkatan produksi komoditas strategis yang tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, namun juga memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan dan melindungi lingkungan melalui praktik pertanian berkelanjutan.

Capaian hasil Kementerian Pertanian disajikan sebagai bukti keberhasilan, tercermin dari pertumbuhan PDB sektor pertanian, NTP, NTUP, dan nilai ekspor komoditas pertanian selama lima tahun terakhir. Capaian positif ini dilakukan dalam upaya menyediakan pangan bagi masyarakat, mewujudkan kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi beberapa komoditas strategis juga menunjukkan keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan program pembangunan nasional. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan penyiapan dan penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta dukungan pembiayaan dari APBN dan *Non*-APBN Kementerian Pertanian. Selain itu, penguatan akses pembiayaan pertanian melalui KUR, asuransi, dan subsidi juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target. Capaian ini akan menjadi landasan untuk perbaikan di masa mendatang guna terus meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Keberhasilan, permasalahan, dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2023 akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dan perencanaan periode selanjutnya. Untuk mencapai target akhir periode RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, diperlukan kerja keras dan inovasi di tengah berbagai tantangan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian masih memerlukan perbaikan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian. Selain itu, kolaborasi erat dengan lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil turut memperkuat keberhasilan program pertanian. Meski demikian, tantangan dalam implementasi tetap dihadapi, namun Kementerian Pertanian telah merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di samping itu, pengenalan inovasi dan teknologi baru dalam sektor pertanian menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan kerja keras dan sinergi yang terjalin, Kementerian Pertanian siap melangkah ke depan menuju pertanian cemerlang, Indonesia gemilang.



